

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PENYALURAN KUR DALAM PENGEMBANGAN
UMKM DI KELURAHAN LAKAWAN, KECAMATAN
ANGGERAJA, KABUPATEN ENREKANG**



OLEH

**MIFTAHUL JANNAH
NIM: 2120203861206127**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PENYALURAN KUR DALAM PENGEMBANGAN
UMKM DI KELURAHAN LAKAWAN, KECAMATAN
ANGGERAJA, KABUPATEN ENREKANG**



OLEH

**MIFTAHUL JANNAH
NIM: 2120203861206127**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
Pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Implementasi Penyaluran KUR dalam pengembangan UMKM di Kelurahan Lakawan,, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang

Nama Mahasiswa : Miftahul Jannah

NIM : 2120203861206127

Program Studi : Perbankan syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Nomor :B-4513/In.39/FEBI.04/PP.00.9/07/2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Misdar. M.M

NIDN : 2110117902

(...*Misdar*^{Acc}...)

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam



Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag
NIP. 197102082001122002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Implementasi Penyaluran KUR dalam pengembangan UMKM di Kelurahan Lakawan,, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang

Nama Mahasiswa : Miftahul jannah

NIM : 2120203861206127

Program Studi : Perbankan syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Nomor :B-4513/In.39/FEBI.04/PP.00.9/07/2024

Tanggal Kelulusan : 24 Juli 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji

Misdar, M.M. (Ketua) (.....)

Rusnaena, M.Ag. (Anggota) (.....)

A. Rio Makkulau Wahyu, M.E. (Anggota) (.....)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 197102082001122002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt., Tuhan Semesta Alam yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul *“Implementasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam Pengembangan UMKM di Kelurahan Lakawan, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang”* sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw., beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa pencapaian ini tidak terlepas dari doa, dukungan moral maupun material dari kedua orang tua tercinta, Ayahanda dan Ibunda, serta seluruh keluarga besar yang selalu menjadi penyemangat dalam setiap langkah perjuangan. Terima kasih yang tak terhingga atas kasih sayang, keikhlasan, dan ketulusan dalam mengiringi setiap proses perjalanan studi penulis.

Ucapan terima kasih penulis haturkan dengan penuh hormat dan rasa syukur kepada dosen pembimbing yang telah dengan sabar membimbing dan mengarahkan penulis selama penyusunan skripsi ini, yakni Bapak Misdar, M.M. atas segala waktu, ilmu, dan kesabaran beliau dalam mendampingi penulis.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Rektor IAIN Parepare, Prof. Dr. Hannani, M.Ag., yang telah memberikan fasilitas dan dukungan akademik selama proses perkuliahan.
2. Ibu Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag., atas arahan dan kebijakan yang mendukung mahasiswa dalam menuntaskan studi.
3. Bapak Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil.I selaku Wakil dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Ibu Dr. Damirah, S.E., M.M. selaku Wakil dekan 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
4. Terimah kasih kepada pembimbing akademik saya Ibu Besse Faradiba, S.E., M.M yang telah membimbing sampai semester akhir.
5. Bapak Dr. I Nyoman Budiono, M.M. selaku ketua jurusan Perbankan Syariah yang telah berjasa dan mendedikasikan hidup beliau untuk jurusan, sehingga Jurusan Perbankan Syariah saat ini berkembang dengan baik.
6. Bapak dan Ibu dosen pengajar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah meluangkan waktu dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
7. Pimpinan dan Seluruh jajaran Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Cakke beserta seluruh staf yang telah mengizinkan dan memberikan data informasi terkait penelitian
8. Segenap pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, namun telah berkontribusi dalam bentuk apapun selama proses studi hingga penyusunan skripsi ini.
9. Bapak Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staf, atas bantuan dan akses literatur yang sangat membantu dalam penyusunan skripsi ini.

10. Sahabat-sahabat penulis Firmansyah , Wahyudi, Gufron, Eko, Febri, Amelia, Lala, Dilla, dan Tila yang selalu mendukung dan membantu dalam segala hal selama menyelesaikan skripsi ini.

11. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya D. Mario terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga maupun waktu kepada penulis.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan ke depan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi inspirasi bagi pembaca yang berkepentingan.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Parepare, 23 juni 2025 M
27 Dzulhijjah 1446 H

Penulis,


Miftahul jannah
NIM:2120203861206127

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

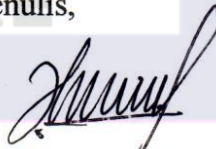
Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Miftahul jannah
Tempat/Tgl. Lahir : Sossok, 13 Februari 2003
NIM : 2120203861206127
Program Studi : Perbankan syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Implementasi Penyaluran KUR dalam Pengembangan UMKM di Kelurahan Lakawan, Kecamatan Annggeraja, Kabupaten Enrekang.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau di buat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 23 juni 2025 M
27 Dzulhijjah 1446 H

Penulis,



Miftahul jannah
NIM:2120203861206127

ABSTRAK

Miftahul Jannah. *Implementasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam Pengembangan UMKM di Kelurahan Lakawan, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang.* (Dibimbing oleh Bapak Misdar)

Kredit usaha rakyat adalah salah satu program pemerintah yang dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan modal usaha, dan meningkatkan pembiayaan kepada usaha petani yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola pinjaman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Lakawan, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang. Fokus penelitian meliputi tiga aspek utama: prosedur penyaluran KUR, tantangan dan hambatan dalam mengakses pembiayaan, serta dampak program KUR terhadap pertumbuhan usaha dan pemberdayaan ekonomi pelaku UMKM.

Metodologi yang di gunakan yaitu pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari pelaku UMKM, petugas bank penyalur (BRI), dan aparat kelurahan setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) prosedur penyaluran KUR oleh BRI Unit Cakke telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melalui tahapan observasi lapangan, verifikasi dokumen, analisis kelayakan usaha menggunakan prinsip 5C, penandatanganan akad, dan pencairan dana. (2) Meskipun demikian, pelaku UMKM masih menghadapi beberapa kendala, seperti rendahnya literasi keuangan, keterbatasan dokumen legal formal, serta pemahaman yang keliru mengenai sifat kredit. (3) Program KUR, meskipun demikian, telah memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan usaha, peningkatan kapasitas produksi, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. KUR tidak hanya berperan sebagai sumber pembiayaan, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang memperkuat kemandirian ekonomi pelaku usaha kecil. Penelitian ini merekomendasikan perlunya sinergi antara lembaga penyalur, pemerintah kelurahan, dan dinas koperasi dalam memperkuat sistem pendampingan, edukasi kewirausahaan, serta akses informasi yang merata bagi seluruh pelaku UMKM.

Kata Kunci: KUR, UMKM Lakawan, Pengembangan Usaha, Implementasi Kebijakan, Pemberdayaan Ekonomi

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	9
B. Landasan Teoritis	12
1. Implementasi	12
2. Kredit Usaha Rakyat (KUR)	15
3. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).....	21
C. Kerangka Konseptual	36
D. Kerangka Pikir.....	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	41

B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	42
C. Fokus Penelitian	43
D. Jenis dan Sumber Data	44
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	45
F. Uji Keabsahan Data.....	48
G. Teknik Analisis Data.....	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A. Hasil penelitian.....	53
B. Pembahasan.....	71
BAB V PENUTUP.....	91
A. Simpulan.....	91
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN.....	99
BIODATA PENULIS	124

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.1	Data UMKM dan Penerima KUR di Kelurahan Lakawan Tahun 2024	3
3.1	Rencana waktu penelitian durasi (Durasi 2 bulan)	43



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	41



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	SK Penetapan Pembimbing	106
2	Surat Observasi	107
3	Surat Izin penelitian dari Dinas Penanaman Modal	108
4	Pedoman wawancara	109
5	Surat Keterangan Wawancara	112
6	Surat keterangan telah melakukan penelitian	123
7	Dokumentasi Wawancara	124
8	Biodata Penulis	130

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsona

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya

ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun.

Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (‘‘).

1.Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dhomma	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ئِي	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
ئُو	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : Kaifa

حَوْلَ : Haula

- c. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
نَا / ئِي	Fathah dan Alif atau ya	A	a dan garis diatas
ئِي	Kasrah dan Ya	I	i dan garis diatas
ئُو	Kasrah dan Wau	U	u dan garis diatas

Contoh :

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudah al-jannah* atau *raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ-), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

ربَّنا : *Rabbanā*

نَجَّينَا : *Najjainā*

الْحَقَّ : *al-haqq*

الْحَجَّ : *al-hajj*

نُعْم : *nu‘ima*

عَدُو : *aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي ي), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عربي : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

علي : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا

(*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy- syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ: *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ: *ta 'murūna*

النَّوْعُ: *al-'nau'*

شَيْءٌ: *syai'un*

أَمْرٌ: *Umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

i. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

الله دِينُ *Dīnullah*

الله با *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ aljalālāh*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ *Hum fī rahmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahrul Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt	=	subḥānahū wa ta'āla
saw.	=	ṣallallāhu 'alaihi wa sallam
a.s.	=	'alaihi al- sallām
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدونمكان
صلعم	=	صلهلا عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدونناشر
الخ	=	الآخرة/الآخرها
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

1. ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s). Dalam catatan kaki/akhir, kata ed. tidak perlu diapit oleh tanda kurung, cukup membubuhkan tanda koma (,) antara nama editor (terakhir) dengan kata ed. Tanda koma (,) yang sama juga mengantarai kata ed. dengan judul buku (menjadi: ed.,). Dalam daftar pustaka, tanda koma ini dihilangkan. Singkatan ed. dapat ditempatkan sebelum atau sesudah nama editor, tergantung konteks pengutipannya. Jika diletakkan sebelum nama editor, ia bisa juga ditulis panjang menjadi, “Diedit oleh....”
2. et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak. Yang mana pun yang dipilih, penggunaannya harus konsisten.

3. Cet. : Cetakan. Keterangan tentang frekuensi cetakan sebuah buku atau literatur sejenis biasanya perlu disebutkan karena alasan tertentu, misalnya, karena karya tersebut telah dicetak lebih dari sekali, terdapat perbedaan penting antara cetakan sebelumnya dalam hal isi, tata letak halaman, dan nama penerbit. Bisa juga untuk menunjukkan bahwa cetakan yang sedang digunakan merupakan edisi paling mutakhir dari karya yang bersangkutan.
4. Terj.: Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
5. Vol.: Volume. Biasanya dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
6. No.: Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural yang berakar pada persoalan kemiskinan dan ketimpangan akses ekonomi masyarakat. Salah satu penyumbang utama stagnasi pembangunan adalah masih tingginya tingkat kemiskinan, terutama di wilayah pedesaan dan daerah tertinggal. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), per Maret 2023, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 25,90 juta jiwa atau sekitar 9,36% dari total populasi nasional. Sebagian besar dari mereka bergantung pada sektor informal dan usaha kecil sebagai sumber utama penghasilan¹

Kemiskinan memiliki dampak langsung terhadap rendahnya kualitas sumber daya manusia. Keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan modal ekonomi menjadi penghambat utama produktivitas masyarakat. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kemiskinan harus melibatkan penguatan sektor ekonomi kerakyatan seperti Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM memainkan peranan vital dalam struktur ekonomi Indonesia. Menurut data Kementerian Koperasi dan UMKM tahun 2022, terdapat lebih dari 64 juta unit UMKM di Indonesia, yang menyerap 97% tenaga kerja nasional dan menyumbang 60,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)²

¹ Badan Pusat Statistik. *Persentase Penduduk Miskin Maret 2023*. Diakses dari <https://www.bps.go.id/>

² Dharma, Sumartono & Sarwono. "Peran KUR dalam Pengembangan UMKM dan Pengentasan Kemiskinan." *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, Vol. 11, No. 1, 2016.

Meski begitu, pelaku UMKM masih menghadapi sejumlah kendala, di antaranya keterbatasan modal, akses pasar, literasi digital, serta kapasitas manajerial. Keterbatasan modal merupakan hambatan utama yang membuat UMKM sulit untuk tumbuh dan bersaing. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah meluncurkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai solusi pembiayaan bagi UMKM yang layak (*feasible*) namun belum *bankable*. Program ini mulai digulirkan pada tahun 2007 melalui Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2007.

KUR memberikan fasilitas pembiayaan dengan bunga rendah dan jaminan pemerintah. Pada tahun 2023, pemerintah menargetkan penyaluran KUR sebesar Rp460 triliun, dengan bunga subsidi sebesar 3% bagi UMKM³. Namun, dalam implementasinya, banyak UMKM yang masih belum memanfaatkan program ini secara optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti rendahnya literasi keuangan, kurangnya pendampingan teknis, dan adanya persepsi keliru bahwa KUR merupakan bantuan hibah dari pemerintah.

Permasalahan tersebut juga ditemukan di tingkat lokal, seperti di Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan. Enrekang merupakan kabupaten dengan sektor pertanian dan perdagangan yang kuat, namun masih memiliki angka kemiskinan sebesar 9,83% pada tahun 2022⁴. Kelurahan Lakawan di Kecamatan Anggeraja adalah salah satu wilayah yang memiliki potensi ekonomi berbasis UMKM, namun menghadapi kesenjangan akses pembiayaan. Data dari Dinas Koperasi dan UMKM

³ Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Enrekang. *Laporan Data UMKM Tahun 2023*. Enrekang

⁴ Kementerian Koperasi dan UKM RI. *Data UMKM Indonesia 2022–2023*. Diakses dari <https://kemenkopukm.go.id/>

Enrekang menunjukkan bahwa dari 178 unit UMKM di Lakawan, hanya 42 unit yang tercatat sebagai penerima KUR selama tahun 2023.

Tabel 1.1 Data UMKM dan Penerima KUR di Kelurahan Lakawan Tahun 2024

NO	JENIS USAHA	JUMLAH UMKM	PENERIMA KUR	PERSENTASE (%)
1	Kuliner	67	15	22,4
2	Pertanian Olahan	42	11	26,2
	Petani Bawang Merah	18	5	27,8
3	Perdagangan Eceran	51	10	19,6
4	Kerajinan Tangan	18	6	33,3
	Total	178	42	23,6

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Enrekang, 2024

Tabel 1.1 memperlihatkan sebaran jenis usaha UMKM di Kelurahan Lakawan, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, serta keterkaitan mereka dengan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada tahun 2024.

Terdapat total 178 unit UMKM aktif di Kelurahan Lakawan. Sebagian besar pelaku usaha bergerak di bidang kuliner dengan jumlah 67 unit usaha (37,6% dari total UMKM), namun hanya 15 unit (22,4%) yang tercatat telah mengakses program KUR. Bidang perdagangan eceran menempati urutan kedua dengan 51 unit usaha dan 10 penerima KUR(19,6%).

Pada kategori "Pertanian Olahan," tercatat 42 unit usaha, di mana 18 di antaranya merupakan petani bawang merah. Dari kelompok petani bawang merah tersebut, 5 orang berhasil memperoleh fasilitas KUR, dengan tingkat partisipasi sebesar 27,8%. Ini menunjukkan bahwa meskipun kelompok ini tergolong signifikan dalam jumlah, akses terhadap KUR masih perlu dioptimalkan.

Sektor kerajinan tangan mencatatkan 18 unit usaha, dengan 6 penerima KUR atau sebesar 33,3%, yang merupakan persentase tertinggi penerima KUR dibandingkan jenis usaha lainnya. Secara keseluruhan, dari 178 pelaku UMKM, hanya 42 unit usaha (23,6%) yang memanfaatkan program KUR. Hal ini menandakan bahwa tingkat penetrasi KUR terhadap pelaku UMKM di Kelurahan Lakawan masih relatif rendah, dan dibutuhkan strategi lebih efektif dalam sosialisasi, pendampingan, serta penyederhanaan prosedur akses pembiayaan bagi pelaku UMKM, khususnya untuk sektor pertanian olahan seperti petani bawang merah.

Selain itu, tidak semua pelaku UMKM memiliki dokumen legal formal seperti izin usaha atau laporan keuangan sederhana, padahal hal tersebut menjadi syarat penting dalam pengajuan KUR. Dalam survei awal yang dilakukan peneliti terhadap 20 pelaku UMKM di Lakawan, sebanyak 70% menyatakan belum pernah mengakses KUR, dan 55% di antaranya menyebutkan “tidak tahu cara mengajukan” sebagai alasan utama⁵.

Bahkan sebagian masyarakat masih menganggap KUR sebagai bentuk bantuan yang tidak perlu dikembalikan, sehingga muncul masalah *moral hazard* dan risiko kredit macet. Perbankan sebagai penyalur KUR pun menghadapi dilema: di satu sisi mereka didorong untuk memperluas pembiayaan, namun di sisi lain harus tetap menjaga kualitas kredit agar tidak menambah *Non Performing Loan* (NPL).

Menurut laporan BRI Unit Enrekang, dari 50 debitur KUR yang dicatat pada semester I tahun 2023, terdapat 7 debitur (14%) yang menunggak lebih dari 3 bulan, menunjukkan perlunya evaluasi dalam proses seleksi dan pendampingan usaha. Dari

⁵ Kementerian Koordinator Perekonomian. *Pedoman Umum Kredit Usaha Rakyat Tahun 2023*. Jakarta: Kemenko Perekonomian.

sisi peluang, Kelurahan Lakawan sebenarnya memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, khususnya dalam pengolahan hasil pertanian dan produk kuliner khas yang dapat dikembangkan menjadi komoditas unggulan.

Dengan adanya akses modal melalui KUR, UMKM diharapkan mampu meningkatkan kapasitas produksi, memperbaiki kualitas produk, dan memperluas jaringan pemasaran, baik lokal maupun digital. Penyaluran KUR yang efektif tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi mikro, tetapi juga berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja baru di tingkat lokal.

Berdasarkan perhitungan simulatif, peningkatan akses KUR sebesar 10% di Lakawan diperkirakan dapat menambah 27 unit usaha aktif dan menyerap sekitar 65 tenaga kerja baru pada sektor informal. Oleh karena itu, optimalisasi penyaluran KUR menjadi kebutuhan mendesak bagi Kelurahan Lakawan, bukan hanya untuk memacu pertumbuhan usaha, tetapi juga untuk memperkuat ketahanan ekonomi lokal.

Berangkat dari kenyataan tersebut, perlu dilakukan kajian lebih mendalam terhadap bagaimana implementasi penyaluran KUR di Lakawan, apa saja tantangan yang dihadapi, serta bagaimana pengaruhnya terhadap pengembangan UMKM. Kajian ini penting untuk memberikan gambaran utuh bagi pemerintah daerah, lembaga penyalur, dan stakeholder lokal dalam memperbaiki skema pendampingan dan fasilitasi pembiayaan.

Penelitian ini juga diharapkan dapat menyumbang secara teoritis terhadap studi implementasi kebijakan pembiayaan mikro, serta menawarkan model pendekatan berbasis konteks lokal. Di sisi metodologis, penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara dan observasi terhadap pelaku UMKM dan lembaga penyalur KUR. Fokus utama

penelitian terletak pada *proses implementasi, faktor pendukung dan penghambat*, serta *dampak langsung* dari program KUR terhadap pengembangan UMKM.

Dengan pendekatan kontekstual di Kelurahan Lakawan, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan mikro yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini juga menjawab *gap* literatur yang selama ini lebih banyak membahas KUR dalam skala makro dan belum menyoroti karakteristik lokal secara spesifik. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menggali lebih dalam melalui skripsi berjudul **"Implementasi Penyaluran KUR dalam Pengembangan UMKM di Kelurahan Lakawan, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang."**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian dalam latar belakang masalah tersebut, dapat didefinisikan masalah yang dihadapi yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Lakawan, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang?
2. Apa saja tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam mengakses dan memanfaatkan fasilitas KUR di Kelurahan Lakawan?
3. Bagaimana dampak penyaluran KUR terhadap pertumbuhan usaha, kapasitas produksi, dan pemberdayaan ekonomi pelaku UMKM di Kelurahan Lakawan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk menguraikan prosedur penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Lakawan, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang.
2. Untuk menguraikan tantangan dan hambatan yang dihadapi pelaku UMKM dalam mengakses dan memanfaatkan program KUR di Kelurahan Lakawan.
3. Untuk menganalisis dampak penyaluran KUR terhadap pertumbuhan usaha, peningkatan kapasitas produksi, dan pemberdayaan ekonomi pelaku UMKM di Kelurahan Lakawan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman mengenai pengaruh penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap pengembangan UMKM di Kelurahan Lakawan, Kecamatan Anggeraja. Dengan menggali aspek penyaluran KUR dan keterbatasan modal dalam konteks UMKM, penelitian ini akan memperkaya literatur tentang pengelolaan usaha kecil, terutama kaitannya dengan akses pembiayaan dan inovasi. Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi pada pengembangan kajian ekonomi lokal, sehingga dapat mendukung literatur yang ada tentang pentingnya peran UMKM dalam perekonomian regional.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman mengenai pengaruh penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap pengembangan

UMKM di Kelurahan Lakawan, Kecamatan Anggeraja. Dengan menggali aspek penyaluran KUR dan keterbatasan modal dalam konteks UMKM, penelitian ini akan memperkaya literatur tentang pengelolaan usaha kecil, terutama kaitannya dengan akses pembiayaan dan inovasi. Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi pada pengembangan kajian ekonomi lokal, sehingga dapat mendukung literatur yang ada tentang pentingnya peran UMKM dalam perekonomian regional.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan penelitian relevan merupakan gambaran mengenai penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan pemahaman berdasarkan hasil penelitian sebelumnya. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini:

Penelitian Pertama, Penelitian oleh Rina Maulida dan Joko Prasetyo tahun 2023 dengan judul “Pengaruh Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap Pembangunan UMKM di Kabupaten Enrekang”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penyaluran KUR terhadap pertumbuhan dan perkembangan UMKM di daerah tersebut. Dengan menggunakan metode kuantitatif dan kuesioner yang disebar kepada 150 pelaku UMKM, hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran KUR memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan dan kapasitas produksi UMKM. Temuan ini menekankan pentingnya akses pembiayaan bagi pelaku UMKM untuk mendorong pertumbuhan usaha.⁶

Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya terletak pada fokus kajian yang melibatkan penyaluran KUR dan dampaknya terhadap UMKM. Namun, perbedaan mencakup lokasi penelitian, penelitian Rina dan Joko dilakukan di Kabupaten Enrekang secara umum, sementara penelitian saya lebih spesifik berfokus pada Kelurahan Lakawan, Kecamatan Anggeraja.

⁶ Rina Maulida Joko Prasetyo, “Pengaruh Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Pembangunan UMKM Di Kabupaten Enrekang” (2023).

Penelitian Kedua, penelitian oleh Hardiyanti tahun 2019 dengan judul “Implementasi Program Kredit Usaha Rakyat Di Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi KUR dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan UMKM. Menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini melibatkan wawancara dengan 9 informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program KUR telah meningkatkan kepuasan masyarakat, meskipun terdapat beberapa kendala dalam pelayanan yang perlu diperbaiki.⁷

Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya terletak pada fokus kajian mengenai implementasi KUR dan dampaknya terhadap UMKM. Namun, perbedaan mencakup lokasi penelitian, Hardiyanti berfokus pada Kecamatan Alla, sedangkan penelitian saya meneliti Kelurahan Lakawan, Kecamatan Anggeraja.

Penelitian Ketiga, Penelitian oleh Siti Fatimah tahun 2023 dengan judul “Dampak Program KUR terhadap Pertumbuhan UMKM di Daerah Pedesaan”. Penelitian ini menganalisis bagaimana implementasi program KUR berpengaruh terhadap pertumbuhan UMKM di daerah pedesaan. Metode yang digunakan adalah survei dengan 120 responden, dan hasilnya menunjukkan bahwa program KUR mampu meningkatkan akses pembiayaan dan mendorong pertumbuhan usaha. Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program KUR di lapangan.⁸

Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya terletak pada fokus analisis dampak program KUR terhadap pertumbuhan UMKM. Namun, perbedaan terletak

⁷ Hardiyanti, “Implementasi Program Kredit Usaha Rakyat Di Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang” (2019).

⁸ Siti Fatimah, “Dampak Program KUR Terhadap Pertumbuhan UMKM Di Daerah Pedesaan” (2023).

pada konteks lokasi dan spesifik tantangan yang dihadapi, penelitian Siti berfokus pada daerah pedesaan secara umum, sedangkan penelitian saya lebih terperinci mengenai kondisi di Kelurahan Lakawan, termasuk faktor keterbatasan modal yang dihadapi oleh pelaku UMKM.

Penelitian Keempat, Penelitian oleh Iztiyar 2018 dengan Judul "Dampak Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap Pemberdayaan UMKM". Penelitian ini bertujuan Mengkaji dampak KUR terhadap pemberdayaan pelaku UMKM dan kesempatan kerja. Dan hasil dari penelitian ini adalah KUR berkontribusi positif terhadap pendapatan pelaku usaha dan menurunkan tingkat kemiskinan.⁹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah berfokus pada pemberian kredit usaha rakyat (KUR) terhadap UMKM. Namun, terdapat juga perbedaan yang terletak pada tujuan penelitian ini yaitu pada penelitian saya mengkaji tentang Implementasi penyaluran KUR sedangkan pada penelitian ini mengkaji tentang dampak KUR terhadap Pertumbuhan UMKM.

Penelitian kelima, Penelitian oleh Dharma, Sumartono, & Sarwono 2016 dengan Judul "Peran KUR dalam Pengembangan UMKM dan Pengentasan Kemiskinan". Penelitian ini bertujuan Menganalisis peran KUR dalam mendukung pengembangan UMKM dan dampaknya terhadap pengentasan kemiskinan. Hasil dari Penelitian ini menunjukkan bahwa KUR mampu meningkatkan daya saing UMKM dan memberikan dampak positif pada perekonomian lokal.¹⁰

⁹ Iztiyar, "Dampak Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Pemberdayaan UMKM" (2018).

¹⁰ Sarwono Dharma, Sumartono, "Peran KUR Dalam Pengembangan UMKM Dan Pengentasan Kemiskinan" (2016).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya terletak pada pembahasannya yang mana pada penelitian ini mengkaji tentang peran KUR dalam pengembangan UMKM sedangkan pada penelitian saya tentang Implementasi Penyaluran KUR untuk pengembangan UMKM. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah sama-sama bertujuan untuk pengembangan UMKM.

B. Landasan Teoritis

1. Implementasi

a. Pengertian Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi dilakukan setelah adanya perencanaan yang sudah dianggap sempurna.

1) Menurut Nurdin Usman

Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, Tindakan atau mekanisme pada suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dalam mencapai tujuan kegiatan tersebut.

2) Menurut Guntur Setiawan

Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan terhadap proses interaksi antara tujuan dan Tindakan pada pencapaiannya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang lebih efektif.¹¹

Dari pengertian-pengertian di atas kita ketahui bahwasannya kata implementasi itu bermuara pada mekanisme pada suatu sistem. Implementasi merupakan penerapan atas pelaksanaan pada setiap kegiatan yang akan

¹¹ Fitri Rahma, “Implementasi Pembiayaan Produk Kepemilikan Rumah (KPR) Pada BPR Syariah Al-Makmur Pokan Komih Limbanang Kabupaten Limapuluh” (2020).

dijalankan oleh suatu lembaga atau organisasi dimana penerapannya tersebut dapat memberikan pelaksanaan yang bagus terhadap perencanaan yang sudah disusun secara sedemikian rupa sehingga nantinya dapat dijalankan dengan benar. Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri melainkan implementasi dipengaruhi oleh objek berikutnya yaitu standar.

b. Tujuan Implementasi

Adapun beberapa tujuan dari implementasi yang bisa kita ketahui yaitu:¹²

- 1) Tujuan utama dari implementasi yaitu untuk melaksanakan rencana yang telah disusun dengan cermat, baik itu oleh individu maupun kelompok.
- 2) Untuk menguji serta mendokumentasikan suatu prosedur dalam penerapan rencana atau kebijakan.
- 3) Untuk dapat mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai di dalam perencanaan atau kebijakan yang telah dirancang.
- 4) Untuk mengetahui kemampuan individu atau kelompok dalam menerapkan suatu kebijakan atau rencana sesuai dengan yang diharapkan.
- 5) Untuk mengetahui keberhasilan tingkat pada suatu kebijakan atau rencana yang telah dirancang demi perbaikan atau peningkatan mutu.

c. Unsur-Unsur Implementasi

Adapun unsur-unsur implementasi meliputi:¹³

- 1) Adanya program yang dilaksanakannya.

¹² S. Munawarah, *“Implementasi Pembiayaan KPR IB Muamalat Pada Bank Muamalat Kota Palangka Raya Ditinjau Dalam Ekonomi Islam”* (2020).

¹³ Fitri Handayani, *“Implementasi Akad Murabahah Pada Pembiayaan KPR Di Bank Tabungan Negara Syariah Parepare”* (2018).

- 2) Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.
- 3) Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan, pelaksanaan, maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.

d. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi adalah standar dan sasaran pada kebijakan yang harus jelas dan terukur sehingga nantinya dapat direalisasikan. Implementasi perlu dukungan oleh sumber daya baik sumber daya manusia (*human resources*) maupun sumber daya non manusia (*non-human resources*). Karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur biokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam biokrasi. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi, variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat menunggu keberhasilan implementasi. Disposisi implementor, ini mencakup pada 3 hal yang sangat penting, yakni: respon, kognisi, dan intensitas disposisi implementor.¹⁴

Dalam rangka mengupayakan keberhasilan kebijakan maka perlu adanya tantangan-tantangan tersebut yang harus dapat teratasi sedini mungkin. Pada suatu disisi lain bahwa untuk dapat mencapai keberhasilannya ada banyak variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan baik yang bersifat individual maupun kelompok atau institusi.

Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya *policy maker* untuk mempengaruhi perilaku birokrat sebagai pelaksana agar bersedia

¹⁴ Tasmiah, “Respon Nasabah Terhadap Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan Pada BTN Syariah KCPS Parepare” (2022).

memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran. Kompleksitas implementasi bukan hanya ditunjukkan oleh banyaknya aktor atau unit organisasi yang terlibat, tetapi juga dikarenakan proses implementasi itu dipengaruhi oleh berbagai variabel-variabel yang kompleks, baik itu variabel yang individual maupun variabel organisasi, dan masing-masing variabel tersebut berpengaruh dan juga saling berinteraksi terhadap satu sama lain.

2. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

a. Pengertian KUR

Kredit usaha rakyat adalah salah satu program pemerintah yang dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan modal usaha, dan meningkatkan pembiayaan kepada usaha petani yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola pinjaman.

Kredit berasal dari bahasa latin, yaitu *credere*, yang artinya percaya. Oleh sebab itu, dasar dari kredit adalah kepercayaan. Maksudnya adalah pemberi kredit percaya bahwa debitur akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Terdapat unsur-unsur yang terkandung dalam penyerahan suatu fasilitas kredit yaitu kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, risiko, dan balas jasa.

Kredit usaha rakyat adalah salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk mendukung UMKM dalam bentuk pembiayaan modal kerja. Usaha rakyat yang diharapkan untuk menggunakan KUR ini yaitu meliputi keseluruhan bentuk usaha, terutama usaha yang bergerak di sektor usaha produktif seperti pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian,

kehutanan, dan jasa keuangan simpan pinjam.¹⁵ Program ini bertujuan untuk memberikan support pada UMKM yang dinilai produktif namun masih membutuhkan suntikan modal agar lebih berkembang.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat, pengertian KUR adalah “kredit atau pembiayaan kepada UMKM-K (Usaha Mikro, Kecil, Menengah-Koperasi) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. Sejatinnya dana Kredit Usaha Rakyat yang disalurkan 100% berasal dari dana bank penyalur. Peran pemerintah adalah memberikan penjaminan. Oleh karena itu, UMKM yang mendapatkan akses KUR wajib melunasi KUR yang diterimanya dengan membayar cicilan sesuai besaran bunga dan jangka waktu yang disepakati.¹⁶

b. Penyaluran KUR

Menurut Azizah L M, skema penyaluran KUR terbagi atas beberapa, sebagai berikut:¹⁷

1) Permohonan Kredit

Permohonan fasilitas kredit mencakup:

- a) Permohonan baru untuk mendapat suatu jenis fasilitas kredit.
- b) Permohonan tambahan suatu kredit yang sedang berjalan.
- c) Permohonan perpanjangan atau pembaharuan masa kredit yang telah berakhir jangka waktunya.

¹⁵ Masfi Sya'fiatul Ummah, “Sistem Pembentukan terpusat strategi melestari” 11, no. 1 (2019): 1–14.

¹⁶ Yona, “Peran Pemerintah Terhadap Kredit Usaha Rakyat” Jakarta, 2012, 32.

¹⁷ L M Azizah, “Peran Penyaluran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Di Bank BRI Syariah KCP Mojokerto Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah,” Skripsi, 2020.

- d) Permohonan-permohonan lainnya untuk perubahan fasilitas kredit yang berjalan.

2) Penyelidikan Kredit

Yang dimaksud dengan penyelidikan kredit adalah pekerjaan yang meliputi:

- a) Wawancara dengan pemohon kredit (debitur).
- b) Pengumpulan data yang berhubungan dengan permohonan kredit yang diajukan nasabah.
- c) Pemeriksaan atas kebenaran dan kewajiban mengenai hal-hal yang ditemukan nasabah dan informasi lain yang diperoleh.
- d) Penyusunan laporan seperlunya mengenai hasil penyelidikan yang telah dilaksanakan.

3) Keputusan atas Permohonan Kredit

Dalam hal ini yang dimaksud dengan keputusan adalah setiap tindakan pejabat yang berdasarkan wewenangnya berhak mengambil keputusan berupa menolak, menyetujui dan atau mengusulkan permohonan fasilitas kredit kepada pejabat yang lebih tinggi. Setiap keputusan permohonan kredit harus memperhatikan penilaian syarat-syarat umum yang pada dasarnya tercantum dalam laporan.

4) Penolakan Permohonan Kredit

Penolakan permohonan kredit dapat terjadi apabila:

- a) Penolakan permohonan kredit yang secara nyata dianggap oleh bank secara teknis tidak memenuhi persyaratan.
- b) Adanya keputusan penolakan dari direksi mengenai permohonan kredit.

- c) Persetujuan Permohonan Kredit, persetujuan permohonan kredit adalah keputusan bank untuk menyetujui sebagian atau seluruh permohonan kredit dari calon debitur. Untuk melindungi kepentingan bank dalam pelaksanaan persetujuan tersebut, maka biasanya ditegaskan. Terlebih dahulu syarat-syarat fasilitas kredit dan prosedur yang harus ditempuh oleh nasabah. Langkah-langkah yang harus diambil antara lain: Pertama, surat penegasan persetujuan permohonan kredit kepada pemohon. Kedua, peningkatan jaminan. Ketiga, Penandatanganan perjanjian kredit. Keempat, Informasi untuk bagian lain. Kelima, pembayaran materai kredit. Keenam, Asuransi barang jaminan. Ketujuh, Asuransi Kredit.

5) Pencairan fasilitas Kredit

Pencairan fasilitas kredit adalah setiap transaksi dengan menggunakan kredit yang telah disetujui oleh bank. Dalam praktiknya, pencairan kredit ini berupa pembayaran dan atau pemindah bukuan atau beban rekening pinjaman atau fasilitas lainnya. Bank hanya menyetujui pencairan kredit oleh nasabah, bila syarat-syarat yang harus dipenuhi nasabah yang telah dilaksanakan. Perlu diketahui bahwa peningkatan jaminan dan penandatanganan perjanjian kredit mutlak harus mendahului pencairan kredit. Apabila calon debitur telah memenuhi semua syarat dan prosedur kredit, maka bank akan menetapkan waktu. Kapan kredit tersebut dapat dicairkan. Pada saat kredit akan dicairkan terlebih dahulu debitur akan menandatangani surat atas akta perjanjian kredit beserta lampiran-lampirannya. Surat Perjanjian Kredit (SPK) ini, dapat dibuat di bawah tangan atau dibuat di hadapan notaris, tergantung dari besar kecilnya kredit yang diberikan atau sesuai dengan kebijakan masing-masing bank. Lampiran

dari SPK biasanya terdiri dari akta perikatan jaminan (hipotik, fiducia, atau gadai), surat kuasa penjual dan lain-lain.

6) Pelunasan Fasilitas Kredit

Pelunasan kredit adalah dipenuhinya semua kewajiban nasabah terhadap bank yang berakibat hapusnya ikatan perjanjian kredit. Administrasi dan pembukuan kredit merupakan proses pengumpulan dan penyajian informasi perkreditan pada suatu bank. Dari administrasi kredit, bank dapat memberikan pendapat sebagai alat dalam menunjang kegiatan-kegiatan dari proses perkreditan secara perorangan maupun secara keseluruhan. Selain itu juga dapat dijadikan sebagai alat dalam sistem dokumentasi perkreditan. Dengan adanya administrasi kredit yang baik, dapat mempermudah laporan-laporan di bidang perkreditan baik untuk kepentingan intern (kepentingan manajemen dan dewan komisaris) maupun untuk pihak eksternal (Bank Indonesia dan debitur).

c. Dampak KUR Terhadap UMKM

Dapat diketahui dampak dari pemberian kredit terhadap pelaku usaha atau orang yang menerima kredit ialah pendapatan dari pedagang kecil dapat meningkat jika kredit yang diberikan secara tepat. Misalnya, tidak mengambil pinjaman dengan jumlah besar dengan resiko pembayaran yang dapat memberatkan pedagang kecil. Dan pemberian kredit yang telah diberikan tidak disalah gunakan atau harus dengan benar-benar digunakan untuk menambah modal usahanya. Pendapatan yang cukup akan membawa dampak yang baik bagi pedagang, dan akan memberikan dampak yang baik bagi perekonomian negara. Karena dapat mengurangi kesenjangan dan kemiskinan. Pendapatan

masyarakat yang meningkat juga bisa membuat perekonomian negara lebih baik sehingga berdampak juga pada kemakmuran negara. Program pemerintah saat ini yang sedang berlangsung dalam rangka mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah dikenal dengan nama Kredit Usaha Rakyat (KUR).¹⁸

Tantangan yang dihadapi UMKM saat ini adalah dari sisi permodalan, manajemen, pasaran dan sumber daya manusia, untuk itu program dan kebijakan yang telah dan akan diambil pemerintah dalam memajukan UMKM yaitu, fasilitasi sumber daya manusia melalui diklat UMKM, Fasilitasi pemasaran digital online, fasilitasi permodalan baik melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun melalui lembaga penyaluran dana bergulir koperasi UMKM.

Program KUR dianggap mampu memberikan dampak positif terhadap pemberdayaan UMKM sehingga dapat dijadikan kendaraan untuk meningkatkan kesempatan kerja, pendapatan pelaku usaha UMKM, dan menurunkan Tingkat kemiskinan. Salah satu upaya yang tengah dilakukan oleh pemerintah adalah dengan menggerakkan sektor UMKM melalui akses perkreditan pada lembaga keuangan. Dengan langkah tersebut, maka sektor UMKM akan lebih berdaya yang pada akhirnya akan berakibat pada pengurangan jumlah angka kemiskinan.

Pengembangan usaha mikro melalui pemberdayaan menjadi salah satu tugas pemerintah daerah. Tugas tersebut bertujuan untuk mengangkat serta memberikan dukungan ekonomi kepada masyarakat secara nyata. Dukungan

¹⁸ Swardiansyah, "Dampak Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Perkembangan Pelaku Umkm Dikota Mataram 2021," *Skripsi*, no. July (2020): 1–23.

pemerintah daerah dimaksudkan agar masyarakat memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi yang ada, terutama mengembangkan usaha berskala kecil. Tujuan dari pengembangan usaha mikro adalah terciptanya lapangan pekerjaan untuk masyarakat, serta mengembangkan kemandirian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonominya.¹⁹

3. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

a. Pengertian UMKM

Di negara berkembang seperti Indonesia, UMKM merupakan usaha yang memiliki peran cukup tinggi terutama dalam menciptakan pekerjaan. Dengan jumlah UMKM yang terbilang banyak maka peluang terciptanya lapangan kerja bagi pengangguran pedesaan dan rumah tangga yang memiliki pendapatan rendah.²⁰ Program UMKM juga merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas pada masyarakat. UMKM mampu berperan dalam proses pemerataan dan meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.²¹

Menurut Akifa P.Nayla, UMKM atau yang biasa dikenal dengan usaha kecil menengah merupakan sebuah istilah yang mengacu pada suatu jenis usaha yang didirikan oleh pribadi dan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,00 (belum termasuk tanah dan bangunan).

¹⁹ Maria Ulfa and Mohammad Mulyadi, "Analisis Dampak Kredit Usaha Rakyat Pada Sektor Usaha Mikro Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Makassar," *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 11, no. 1 (2020): 17–28.

²⁰ Puspa Rini *et al.*, "Analisis Penerapan Pembukuan Sederhana Terhadap Umkm Di Lingkungan Ibi-K57," *Jurnal Pengabdian Teratai* 2, no. 1 (2021): 57–65.

²¹ Puji Hastuti and dkk, *Kewirausahaan Dan Umkm*, Yayasan Kita Menulis, 2021.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ialah:

- 1) Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- 2) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
- 3) Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

b. Faktor yang mempengaruhi pengembangan UMKM

Pengembangan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dipengaruhi oleh berbagai faktor. Berikut adalah beberapa factor utama yang mempengaruhi pengembangan UMKM adalah:

1) Akses Pembiayaan

Akses pembiayaan merupakan kemampuan untuk mendapatkan manfaat dalam rangka penyediaan dana hasil dari penyediaan uang atau tagihan yang didapatkan dari bank yang mewajibkan pihak yang dibiayai

untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²² UMKM memiliki peluang yang lebih besar untuk meningkatkan akses pembiayaan, yang pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan dan kesuksesan bisnis mereka, serta mempertimbangkan pentingnya fintech sebagai alternatif pembiayaan digital yang dapat memberikan manfaat signifikan bagi UMKM dalam pengembangan usaha mereka.²³

2) Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Kualitas sumber daya manusia adalah sumber daya yang memiliki kompetensi baik dari aspek fisik maupun aspek intelektual. Mereka yang kompeten tentunya dapat mengelola usahanya dengan baik. Dengan itu usaha yang dijalankan akan lebih berkembang. Kinerja suatu organisasi sangat ditentukan oleh sumber daya manusia yang berada di dalamnya. Apabila sumber daya manusianya memiliki motivasi tinggi, kreatif dan mampu mengembangkan inovasi, kinerjanya akan menjadi semakin baik. Oleh karenanya diperlukan adanya upaya untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia.²⁴ Menurut Naufal Nabawi and Basuki menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia mempengaruhi pengembangan usaha.

3) Infrastruktur

²² Dwi Panggah Febriyanto, Like Soegiono, and Ari Budi Kristanto, “Pemanfaatan Informasi Keuangan Dan Akses Pembiayaan Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah,” *Jurnal Ilmiah Akuntansi* 9, no. 2 (2019) : 147–60,

²³ Dewi Sartika *et al.*, “Pengelolaan Keuangan Dan Akses Pembiayaan Untuk UMKM Naik Kelas Di Kabupaten Banyuwasin,” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Bina Darma* 3, no. 3 (2023): 200–207.

²⁴ Naufal Nabawi and Basuki Basuki, “Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Modal Usaha Pengaruhnya Terhadap Pengembangan Usaha Umkm,” *AL-ULUM: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 8, no. 1 (2022): 111–20.

Menurut Fauzi Ahmad Romadhon, Infrastruktur ialah sistem fisik yang mencukupi keperluan dasar masyarakat di bidang sosial dan ekonomi dan dirancang untuk mendukung kegunaan pemerintahan seperti pengadaan air, listrik, transportasi, pembuangan, dan layanan lainnya.²⁵

Aset fisik yang dirancang kedalam sebuah sistem untuk memberikan manfaat publik yang penting dikenal sebagai infrastruktur. Dengan demikian, infrastruktur terdiri dari berbagai sarana dan prasarana yang saling terkait yang terhubung dalam suatu jaringan yang utuh.

Secara strategis peranan penyediaan infrastruktur bagi UMKM adalah:

- a) Mempercepat dalam penyediaan barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan biaya yang lebih murah sehingga berdampak terhadap harga barang dan jasa yang murah dengan kualitas yang baik oleh UMKM.
- b) Infrastruktur yang baik dapat memperlancar transportasi yang pada gilirannya merangsang adanya stabilisasi dan mengurangi disparitas harga antar daerah (penyamaan harga). Dengan adanya kemudahan transportasi, maka barang-barang dapat dialirkan atau didistribusi ketempat-tempat yang kekurangan (defisit) akan suatu barang sehingga akan tercapai kestabilan harga-harga.
- c) Insfrastruktur yang memperlancar transportasi berfungsi meningkatkan nilai tambah barang dan jasa, karena banyaknya daerah yang letaknya jauh dari pasar, sehingga berdampak terhadap ongkos angkut yang mahal bagi pelaku UMKM. Dengan tersedianya transportasi yang baik dan murah memungkinkan hasil produksi daerah tersebut dapat

²⁵ L M Azizah, "Peran Penyaluran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Di Bank BRI Syariah KCP Mojokerto Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah," Skripsi, 2020.

diangkut dan dijual kepasar atau dengan kata lain pelaku UMKM dapat menjangkau konsumen.

- d) Infrastruktur yang memperlancar transportasi turut memengaruhi terbentuknya harga yang efisien. Transportasi yang baik dan murah akan menurunkan biaya transaksi.
- e) Infrastruktur yang memperlancar transportasi dapat menimbulkan spesialisasi antar daerah. Transportasi murah dan mudah akan mendorong pembagian kerja dan spesialisasi secara geografis antar daerah. Infrastruktur merupakan instrumen untuk memperlancar berputarnya roda perekonomian sehingga bisa mempercepat akselerasi pembangunan. Semakin tersedianya infrastruktur akan merangsang pembangunan di suatu daerah. Sebaliknya, pembangunan yang berjalan cepat akan menuntut tersedianya infrastruktur agar pembangunan tidak tersendat. Dengan demikian, infrastruktur berguna untuk memudahkan mobilitas faktor produksi, terutama penduduk, memperlancar mobilitas barang dan jasa, juga memperlancar perdagangan antar daerah.²⁶

4) Kebijakan Pemerintah

Pemerintah daerah dalam hal ini dapat memberikan dorongan kepada masyarakatnya dalam berwirausaha. Salah satunya yaitu dalam wujud sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Melihat berbagai manfaat yang akan diberikan oleh UMKM terhadap daerah, maka peran Pemerintah Daerah dalam memberikan dorongan untuk mengembangkan UMKM ini merupakan suatu hal yang perlu dilakukan agar UMKM di daerah dapat semakin berkembang dan berkontribusi dengan baik. Sehingga bukan hanya

²⁶ Ketut Rendi Astuti, "Infrastruktur Dan Teknologi Dorong Kemajuan Ukm," *Forum Manajemen* 17, no. 2 (2019): 71–86.

sekedar perhatian saja yang diberikan, melainkan juga kontribusi dan bukti nyata yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas dari UMKM melalui berbagai kegiatan pengembangan.²⁷

Sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta dengan PP No. 13 Tahun 2013 mengenai pelaksanaan UU No. 20 tahun 2008 maka pemerintah membuat kebijakan mengenai program-program pemberdayaan UMKM. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan pemberdayaan UMKM adalah pemerintah memberikan izin usaha bagi para pelaku usaha untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu, pengembangan usaha melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, bantuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan serta daya saing usaha, adanya koordinasi dan pengendalian dari pemerintah.²⁸

5) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Konsep pemberdayaan mencakup pengertian pembangunan Masyarakat (*community development*) dan pembangunan yang bertumpu pada Masyarakat (*community-based development*). Terkait dengan pemahaman ini, perlu terlebih dahulu dipahami arti dan makna pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat golongan masyarakat yang sedang kondisi miskin, sehingga mereka dapat melepaskan diri dari perangkap

²⁷ Monica Dwipi Salam and Ananta Prathama, "The Role Of Local Governments In The Development Of Umkm," Jurnal Kebijakan Publik 13, no. 2 (2022): 137–43.

²⁸ Wilfarda Charismanur Anggraeni *et al.*, "Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia," Journal of Government and Politics (JGOP) 3, no. 1 (2021): 47–65.

kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata. Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial.²⁹

Menurut Erni Febrina Harahap, Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan keterampilan, yang harus dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek masyarakatnya sendiri, maupun aspek kebijakannya.³⁰ Karena persoalan atau isu strategis perekonomian masyarakat bersifat lokal spesifik dan problem spesifik, maka konsep dan operasional pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak dapat diformulasikan secara generik.

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa pengembangan atau pemberdayaan adalah suatu upaya yang dilakukan untuk membangun masyarakat dengan memberikan dukungan dan motivasi kepada masyarakat yang memang sudah memiliki potensi artinya masyarakat tersebut memang sudah ada atau sudah memiliki skill/keahlian, akan tetapi keahlian atau potensi itu belum terlihat/tampak, adanya dorongan dan motivasi tersebut

²⁹ Arif Eko Wahyudi Arfianto and Ahmad Riyadh U Balahmar, “Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Ekonomi Desa,” JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik) 2, no. 1 (2014): 53–66

³⁰ L M Azizah, “Peran Penyaluran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Di Bank BRI Syariah KCP Mojokerto Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah,” Skripsi, 2020.

diharapkan tentunya agar mereka meningkatkan potensi yang mereka miliki dan mengupayakan peningkatan tersebut melalui tindakan nyata.³¹

Adapun konsep pemberdayaan ekonomi secara yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Perekonomian rakyat adalah perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat. Perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat adalah bahwa perekonomian nasional yang berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat secara luas untuk menjalankan roda perekonomian mereka sendiri. Pengertian rakyat adalah semua warga negara.
- 2) Pemberdayaan ekonomi rakyat adalah usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Karena kendala pengembangan ekonomi rakyat adalah kendala struktural, maka pemberdayaan ekonomi rakyat harus dilakukan melalui perubahan struktural.
- 3) Perubahan struktural yang dimaksud adalah perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi kuat, dari ekonomi subsistem ke ekonomi pasar, dari ketergantungan ke kemandirian.

Langkah-langkah proses perubahan struktur, meliputi:

- a) Pengalokasian sumber pemberdayaan sumberdaya
 - b) Penguatan kelembagaan
 - c) Penguasaan teknologi, dan
 - d) Pemberdayaan sumberdaya manusia.
- 4) Pemberdayaan ekonomi rakyat, tidak cukup hanya dengan peningkatan produktivitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama, dan hanya

³¹ Yayang Septian Sari, “*Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pariwisata*,” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.

memberikan suntikan modal sebagai stimulan, tetapi harus dijamin adanya kerjasama dan kemitraan yang erat antara yang telah maju dengan yang masih lemah dan belum berkembang.

5) Kebijakannya dalam pemberdayaan ekonomi rakyat adalah:

- a) Pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada aset produksi (khususnya modal).
- b) Memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat.
- c) Penguatan industri kecil.
- d) Mendorong munculnya wirausaha baru, dan
- e) Pemerataan spasial

6) Kegiatan pemberdayaan masyarakat mencakup:

- a) Peningkatan akses bantuan modal usaha
- b) Peningkatan akses pengembangan SDM, dan
- c) Peningkatan akses ke sarana dan prasarana yang mendukung langsung sosial ekonomi masyarakat lokal.

Dapat diketahui UMKM memiliki peluang besar dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui berbagai aspek. Mereka mampu menciptakan lapangan kerja, sehingga mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan lokal. UMKM juga berpotensi untuk mengembangkan produk dan layanan yang unik dan sesuai dengan kebutuhan pasar lokal, meningkatkan diversifikasi ekonomi. Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa adalah bahwa UMKM merupakan komponen vital dalam pengembangan ekonomi lokal. Mereka berkontribusi signifikan dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mendorong diversifikasi ekonomi di pedesaan. UMKM membantu mengurangi ketergantungan pada sektor pertanian dan memperkenalkan berbagai produk serta jasa yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Namun, tantangan seperti keterbatasan akses modal, kurangnya

pelatihan, dan keterbatasan akses pasar masih menjadi hambatan yang perlu diatasi. Dukungan yang lebih besar dari pemerintah, lembaga keuangan, dan pihak swasta sangat penting untuk mengatasi kendala ini dan mengoptimalkan potensi UMKM. Dengan perhatian yang tepat dan upaya bersama, UMKM dapat berperan lebih efektif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, meningkatkan kesejahteraan, dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.³²

Adapun Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dapat dilakukan melalui:

1) Akses Terhadap Sumber Daya

Dalam literatur sumber daya, pengertian atau konsep sumber daya didefinisikan cukup beragam. *Ensiklopedia Webster* yang dikutip oleh Fauzi pada tahun 2004, misalnya mendefinisikan sumber daya antara lain sebagai:

- a) Kemampuan untuk memenuhi atau menangani sesuatu,
- b) Sumber persediaan, penunjang atau bantuan,
- c) Sarana yang dihasilkan oleh kemampuan atau pemikiran seseorang

Akses terhadap sumber daya merupakan elemen kunci kekuatan politik karena memungkinkan individu dan kelompok untuk membentuk opini, dan mendapatkan dukungan, serta mempengaruhi keputusan politik. Sumber daya seperti kekayaan, informasi, dan jaringan sosial memberikan keunggulan strategi, memainkan peran penting dalam proses pengambilan keputusan politik, dan membentuk dinamika kekuasaan dalam masyarakat. Akses sumber daya dalam hal politik maksudnya merujuk pada pemberian pendanaan, fasilitas publik, layanan (informasi dan penelitian), pembinaan

³² Masyarakat Desa, “*Bulletin of Community Engagement*” 4, no. 2 (2024).

dan peningkatan kapasitas, hingga ekonomi yang dimana akses terhadap sumberdaya ini memiliki kaitan dengan kekuatan politik.³³

2) Partisipasi

Partisipasi adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan semua kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam kegiatan yang dilaksanakan. Dimana setiap kegiatan dilaksanakan dengan musyawarah desa dalam bentuk tim pelaksana kegiatan yang melaksanakan program sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³⁴

Dalam pemberdayaan perempuan³⁵ berpendapat bahwa partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi melalui kesanggupan untuk melakukan kontrol internal. Atas sumberdaya materi dan non-material yang penting melalui redistribusi modal atau kepemilikan. Secara garis besar dapat ditarik kesimpulan partisipasi adalah suatu wujud dari peran serta masyarakat dalam aktivitas berupa perencanaan dan pelaksanaan untuk mencapai tujuan pembangunan masyarakat. Wujud dari partisipasi dapat berupa saran, jasa ataupun dalam

³³ Jurnal Pendidikan Geosfer *et al.*, “Akses Terhadap Sumber Daya : Kunci Kekuatan Politik” IX (2024): 311–19,

³⁴ Desi Nisa Isti, Oong Komar, and Nunu Heryanto, “Persepsi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kertajaya Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat,” Pendidikan Luar Sekolah 1, no. 1 (2017): 52–62.

³⁵ Pemberdayaan Perempuan *et al.*, “Program Studi Sosiologi Pembangunan”, no. 2212511030 (2017): 1–10.

bentuk materi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suasana yang demokratis.³⁶

Menurut Wicaksono partisipasi ada beberapa macam berdasarkan cara keterlibatannya yaitu:

a) Partisipasi langsung

Partisipasi langsung adalah partisipasi yang terjadi apabila individu memperlihatkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasinya. Partisipasi ini terjadi jika setiap orang dapat mengajukan pandangan mereka, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya sendiri.

b) Partisipasi tidak langsung

Partisipasi tidak langsung adalah partisipasi yang terjadi jika setiap individu bisa menyampaikan partisipasinya kepada orang lain. Partisipasi ini terjadi jika individu tidak ikut terlibat dalam partisipasi secara langsung karena hal-hal tertentu seperti karena sakit, karena sedang tidak di lokasi pembangunan tersebut dan sebagainya.

c) Pengambilan Keputusan

Pada dasarnya pengambilan keputusan merupakan proses memilih sejumlah alternatif pengambilan keputusan penting bagi pemimpin birokrasi karena proses pengambilan keputusan mempunyai peran penting dalam memotivasi, komunikasi, koordinasi, dan perubahan organisasi.

³⁶ Krisna Wicaksono, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan Desa Wisata (Dewi) Menari Dusun Tanon Desa Ngrawan Kecamatan Getasan," 2017.

Pengambilan keputusan juga dapat didefinisikan sebagai suatu proses pemilihan alternatif terbaik dari beberapa alternatif secara sistematis untuk ditindak lanjuti atau untuk digunakan sebagai suatu cara pemecahan masalah. Pengambilan keputusan memilih berbagai alternatif yang paling menguntungkan berbagai pihak yang berkepentingan.

Pengambilan keputusan dilakukan pada dasarnya untuk mencapai tujuan melalui pelaksanaan dan berintikan pada hubungan kemanusiaan. Untuk suksesnya pengambilan keputusan, maka ada 11 hukum kemanusiaan yang perlu diperhatikan dalam proses pengambilan Keputusan diantaranya:

- (1) Semua orang dalam birokrasi harus diperlakukan secara adil.
- (2) Harus ada sinkronisasi antara tujuan organisasi dan masing-masing anggota organisasi,
- (3) Harus ada suasana iklim kerja yang menyenangkan,
- (4) Interaksi antara atasan dan bawahan hendaknya memadu informalitas
- (5) Manusia tidak boleh diperlakukan sebagai mesin
- (6) Kemampuan bawahan harus dikembangkan terus hingga titik optimum,
- (7) Pekerjaan dalam organisasi hendaknya yang bersifat menantang
- (8) Hendaknya ada pengakuan dan penghargaan terhadap mereka yang berprestasi,
- (9) Kemudahan-kemudahan dalam pekerjaan hendaknya diusahakan untuk memungkinkan setiap orang melaksanakan tugasnya dengan baik,
- (10) Penempatan pegawai dalam birokrasi hendaknya digunakan prinsip *the right man on the place* dan,

- (11) Tingkat kesejahteraan hendaknya diperhatikan antara lain dengan pemberian balas jasa yang setimpal.³⁷

Dapat diketahui, salah satu yang sangat penting dalam kepemimpinan, yaitu pengambilan keputusan. Seorang pimpinan Sebagian besar waktu, perhatian, maupun pikirannya dipergunakan untuk mengkaji proses pengambilan keputusan. Semakin tinggi posisi seseorang dalam kepemimpinan organisasi maka pengambilan keputusan menjadi tugas utama yang harus dilakukan. perilaku dan cara pimpinan dalam pola pengambilan keputusan sangat mempengaruhi perilaku dan sikap dari pada sifatnya.³⁸

Menurut Jeanne Clarisa Wetik dalam proses pengambilan keputusan, suatu organisasi tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Adapun faktor-faktor tersebut antara lain:

a) Posisi atau kedudukan

Dalam rangka pengambilan keputusan, posisi atau kedudukan dapat dilihat dalam hal diantaranya:

- (1) Letak posisi, sebagai pembuat keputusan, penentu keputusan, atau staf.
- (2) Tingkatan posisi, sebagai strategi, *policy* peraturan, organisasional, atau teknis.

b) Masalah

Masalah atau problem adalah yang menjadi penghalang untuk tercapainya tujuan, yang merupakan penyimpangan dari yang diharapkan, direncanakan, dikehendaki atau harus diselesaikan.

³⁷ Dr. Harbani Pasolong, *Teori Pengambilan Keputusan*, Penerbit Alfabeta, Bandung (X), 2023.

³⁸ Wiliani, Jeanne Clarisa Wetik, "Kepemimpinan", *Kinabalu* 11, no. 2 (2017): 50–57.

c) Situasi

Situasi adalah keseluruhan faktor yang berkaitan satu sama lain, dan yang secara bersama-sama memencarkan pengaruh terhadap kita beserta yang hendak kita perbuat.

d) Kondisi

Kondisi adalah keseluruhan faktor yang secara bersama-sama menentukan daya gerak, daya berbuat atau kemampuan kita. Sebagian besar faktor tersebut merupakan sumberdaya.

e) Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai, baik tujuan perorangan, tujuan unit (kesatuan), tujuan organisasi, maupun tujuan usaha pada umumnya telah tertentu atau ditentukan. Tujuan yang telah ditentukan dalam pengambilan keputusan merupakan tujuan antara atau objektif.

3) *Capacity Building* (Pengembangan Kapasitas)

Secara definitif *Capacity Building* adalah suatu serangkaian strategi yang tertuang dalam proses untuk meningkatkan kemampuan seseorang, organisasi, atau sistem untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitasnya.³⁹

Menurut Dwi Pela Agustina, *Capacity Building* juga merupakan merupakan program pelatihan dan pemberdayaan masyarakat yang berfokus pada tiga poin yang hendak dicapai, diantaranya:⁴⁰

³⁹ Muhammad Anggun Manumanoso Prasetyo, Bashori Bashori, and Masriani Masriani, "Model Capacity Building Pada Pesantren Perbatasan Binaan Dinas Pendidikan Dayah Provinsi Aceh," *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 14, no. 1 (2020): 71–96.

⁴⁰ Dwi Pela Agustina, "Peningkatan Capacity Building Melalui Pelatihan Public Speaking Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat Bagi Karang Taruna Pemuda Jongkangan - Yogyakarta

- a) Pengembangan sumber daya manusia (SDM) Masyarakat Lokal.
- b) Penguatan organisasi sistem manajemen aparatur desa.
- c) Reformasi kelembagaan pada organisasi-organisasi lokal

Sementara itu, konsep pengembangan kapasitas menurut UNDP dalam milen fokus pada tiga dimensi, antara lain:

- a) Tenaga kerja (dimensi human resources), yaitu kualitas SDM dan cara SDM dimanfaatkan.
- b) Modal (dimensi fisik), menyangkut sarana material, peralatan, bahan-bahan yang diperlukan dan ruang/gedung.
- c) Teknologi, yaitu organisasi dan gaya manajemen, fungsi, perencanaan, penentuan, pengendalian dan evaluasi, komunikasi, serta sistem informasi manajemen.⁴¹

C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berjudul *“Implementasi Penyaluran KUR dalam Pengembangan UMKM di Kelurahan Lakawan, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang”*, yang berfokus pada implementasi kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan dampaknya terhadap pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di tingkat lokal. Agar pemahaman terhadap konsep-konsep utama dalam penelitian ini menjadi lebih jelas dan terarah, maka disusun kerangka konseptual sebagai landasan teoritis dan operasional.

Kerangka konseptual berfungsi sebagai dasar pemikiran yang menjelaskan pengertian setiap konsep penting yang digunakan dalam penelitian ini. Dengan

Hadapan Orang Banyak Untuk Memengaruhi , Mengubah Pendapat , Mengedukasi , Informatif , Pe” 1, no. 1 (2023): 17–25.

⁴¹ Mu'min Ma'ruf *et al.*, *“Pengembangan Kapasitas (Capacity Building) Usaha Kecil Dan Menengah Bidang Pertanian Di Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor,” J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan)* 6 (2021): 16–32.

memahami kerangka konseptual, pembaca dapat menangkap secara utuh keterkaitan antara proses implementasi KUR, sistem penyalurannya, serta bagaimana hal tersebut berdampak terhadap pengembangan UMKM di wilayah penelitian. Adapun konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Implementasi

Implementasi merupakan proses pelaksanaan suatu kebijakan atau program yang telah dirancang secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks penelitian ini, implementasi mengacu pada pelaksanaan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh lembaga perbankan atau lembaga penyalur di Kelurahan Lakawan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan dari suatu rencana yang telah disusun dengan matang. Keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh faktor perencanaan, koordinasi, serta dukungan sumber daya dan pelaksana.

2. Penyaluran

Penyaluran dalam konteks ini merujuk pada proses distribusi dana Kredit Usaha Rakyat kepada pelaku UMKM. Proses ini mencakup tahapan permohonan, seleksi administrasi, pencairan dana, hingga proses pelunasan. Penyaluran bukan hanya aktivitas administratif, tetapi juga mencerminkan sejauh mana lembaga penyalur mampu menjangkau pelaku usaha kecil yang benar-benar membutuhkan, termasuk mereka yang belum *bankable*.

3. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

KUR adalah program pembiayaan mikro dari pemerintah yang ditujukan untuk mendukung pelaku UMKM yang memiliki usaha layak (*feasible*) tetapi

belum memenuhi persyaratan formal perbankan (belum *bankable*). Program ini dirancang dengan suku bunga yang ringan dan jaminan dari pemerintah. Dalam penelitian ini, KUR dipandang sebagai variabel utama yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan dan daya saing UMKM di Kelurahan Lakawan.

4. Pengembangan

Pengembangan diartikan sebagai proses sistematis yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas suatu entitas, dalam hal ini UMKM. Pengembangan mencakup aspek peningkatan modal kerja, inovasi produk, perluasan pasar, peningkatan keterampilan manajerial, serta peningkatan pendapatan pelaku usaha. Pengembangan UMKM merupakan tujuan akhir dari program KUR, yang perlu dikaji sejauh mana program ini berdampak nyata di lapangan.

5. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

UMKM adalah jenis usaha yang dikelola secara mandiri oleh individu atau kelompok kecil dengan aset terbatas. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, usaha mikro memiliki kekayaan bersih maksimal Rp 50 juta, usaha kecil maksimal Rp 500 juta, dan usaha menengah di bawah Rp 10 miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan usaha). Dalam konteks Kelurahan Lakawan, UMKM menjadi tulang punggung ekonomi lokal, namun masih menghadapi hambatan dalam akses permodalan dan pengembangan usaha yang berkelanjutan.

Dengan memahami kelima konsep di atas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana kebijakan KUR diimplementasikan di tingkat desa dan bagaimana intervensi tersebut memengaruhi perkembangan UMKM secara nyata di Kelurahan Lakawan.

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini disusun untuk menggambarkan hubungan logis antara proses penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Lakawan, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang. Penelitian ini berpijak pada pemahaman bahwa keberadaan program pembiayaan seperti KUR memiliki tujuan untuk memperkuat struktur ekonomi kerakyatan, khususnya dalam pemberdayaan UMKM.

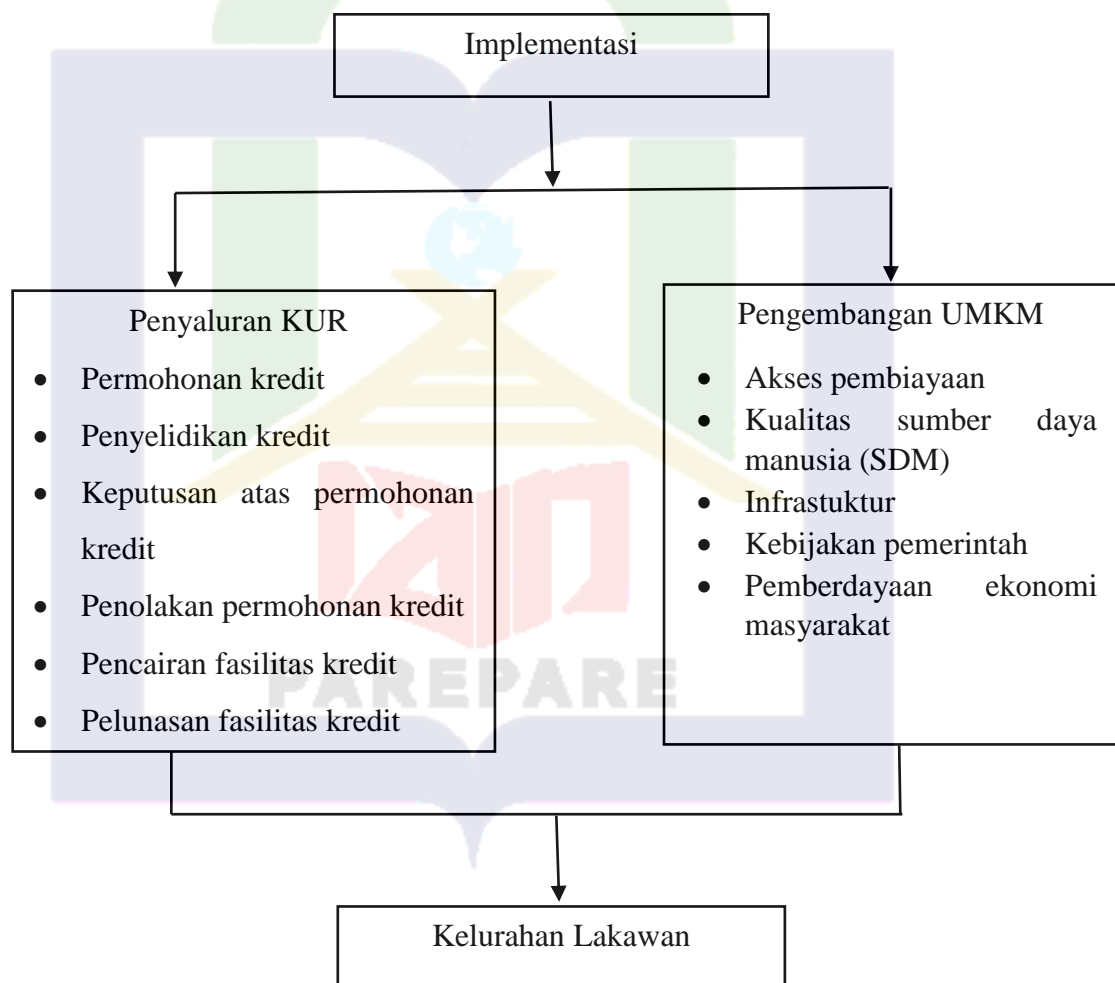
Program KUR menjadi salah satu instrumen strategis pemerintah untuk menjembatani akses permodalan bagi pelaku usaha yang memiliki kelayakan usaha (*feasible*), namun belum memenuhi syarat administratif perbankan (*unbankable*). Dalam konteks ini, implementasi penyaluran KUR dipengaruhi oleh beberapa tahapan seperti proses permohonan, verifikasi kelayakan, pencairan dana, serta proses pelunasan pinjaman. Keberhasilan penyaluran KUR sangat dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat terhadap prosedur, efektivitas sosialisasi program, serta peran pendampingan dari lembaga penyalur.

Di sisi lain, pengembangan UMKM tidak hanya ditentukan oleh tersedianya akses modal, tetapi juga oleh faktor-faktor lain seperti kualitas sumber daya manusia (SDM), infrastruktur pendukung, kebijakan pemerintah, dan kondisi sosial ekonomi lokal. Dalam hal ini, akses terhadap KUR diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi, inovasi produk, perluasan pasar, serta daya saing UMKM.

Namun, di Kelurahan Lakawan, data menunjukkan bahwa tingkat pemanfaatan KUR masih tergolong rendah dibandingkan dengan jumlah UMKM yang aktif. Hal ini menandakan adanya kesenjangan antara potensi yang dimiliki oleh pelaku usaha dan efektivitas implementasi program pembiayaan. Oleh karena itu,

perlu dikaji secara mendalam bagaimana implementasi KUR dijalankan, apa saja tantangan yang dihadapi, serta dampaknya terhadap pemberdayaan ekonomi lokal.

Dengan demikian, alur kerangka pikir penelitian ini dimulai dari adanya kebijakan penyaluran KUR, dilanjutkan pada proses implementasi di lapangan, kemudian dilihat pengaruhnya terhadap aspek-aspek pengembangan UMKM, serta diakhiri dengan refleksi atas tantangan dan peluang perbaikan program di masa depan.



Gambar 2.1 : Skema Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merujuk kepada pedoman yang telah disediakan oleh kampus yaitu pedoman buku penulisan karya ilmiah yang berbasis informasi yang telah diterbitkan oleh IAIN Parepare Nusantara Press. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa hal di antaranya yaitu pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian dan waktu, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, Teknik pengumpulan data dan pengelolaan data, uji keabsahan data, serta Teknik analisis data.⁴²

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan secara langsung di Kelurahan Lakawan, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, dengan tujuan untuk memperoleh data faktual mengenai implementasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan fenomena sosial berdasarkan realitas yang dialami oleh pelaku UMKM dan stakeholder terkait. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami secara mendalam proses penyaluran KUR, kendala yang dihadapi, serta dampaknya terhadap pertumbuhan UMKM di lokasi penelitian.⁴³

⁴² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2023).

⁴³ Ifit Novita Sari et al., *Metode Penelitian Kualitatif* (Malang: UNISMA Press, 2022).

Kualitatif ialah pendekatan penelitian yang berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan fakta-fakta yang ditemukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.⁴⁴ Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji informasi tentang perilaku konsumerisme dalam pengembangan UMKM dikalangan masyarakat Kelurahan Lakawan, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang menjadi tempat penelitian ini adalah di Kelurahan Lakawan, sebuah desa yang terletak di wilayah Kabupaten Enrekang. Adapun penelitian ini akan menggunakan waktu kurang lebih 2 bulan lamanya (d disesuaikan dengan kebutuhan penelitian).

Tabel 3.1 Rencana Waktu Penelitian (Durasi 2 Bulan)

No	Tahapan Kegiatan	Minggu ke-1	Minggu ke-2	Minggu ke-3	Minggu ke-4	Minggu ke-5	Minggu ke-6	Minggu ke-7	Minggu ke-8
1	Finalisasi instrumen dan izin penelitian	✓	✓						
2	Observasi awal lokasi dan pemetaan informan		✓	✓					
3	Wawancara mendalam			✓	✓	✓			
4	Dokumentasi dan pengumpulan data sekunder			✓	✓	✓			
5	Pengolahan dan analisis data					✓	✓	✓	
6	Penyusunan laporan hasil penelitian						✓	✓	✓

⁴⁴ Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014).

7	Revisi dan konsultasi dengan pembimbing							✓	✓
---	---	--	--	--	--	--	--	---	---

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam implementasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh lembaga keuangan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Lakawan, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang. Program KUR merupakan inisiatif pemerintah untuk memperkuat permodalan usaha dalam rangka percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM .

Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam mengakses dan memanfaatkan KUR. Beberapa kendala yang sering muncul antara lain keterbatasan informasi mengenai program KUR, persyaratan administratif yang kompleks, dan kurangnya jaminan yang dimiliki oleh pelaku usaha . Selain itu, proses pengajuan yang berbelit-belit dan kurangnya pendampingan dari pihak terkait juga menjadi faktor penghambat dalam penyaluran KUR .

Meskipun demikian, penyaluran KUR memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan usaha dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan akses permodalan yang lebih mudah, pelaku UMKM dapat meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pasar, dan menciptakan lapangan kerja baru. Hal ini pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Lakawan .

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan melalui kegiatan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi di lapangan. Sumber data mencakup pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Lakawan, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang. Untuk mendalami implementasi penyaluran KUR dan dampaknya, peneliti melakukan wawancara langsung dengan beberapa informan kunci. Informan tersebut terdiri dari pelaku UMKM yang telah menerima maupun yang belum menerima fasilitas KUR, petugas dari Bank BRI Unit Cakke sebagai pihak penyalur KUR, serta aparat Kelurahan Lakawan yang memahami konteks sosial dan ekonomi masyarakat setempat. dampak penyaluran KUR di wilayah penelitian.

Secara khusus, data primer juga melibatkan pelaku usaha dari kategori petani bawang merah yang termasuk dalam sektor pertanian olahan, mengingat pentingnya kontribusi mereka terhadap struktur UMKM di wilayah tersebut. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pelaku UMKM kuliner, perdagangan eceran, kerajinan tangan, serta petani bawang merah untuk menggali pengalaman mereka terkait akses dan pemanfaatan program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara inilah yang menjadi dasar dalam menganalisis implementasi penyaluran KUR dalam pengembangan UMKM di Kelurahan Lakawan.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh bersumber dari buku-buku sebagai pelengkap sumber data primer. Data sekunder meliputi dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian, serta tulisan-tulisan yang mendukung dan memperkuat data primer yang telah diperoleh.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Adapun Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penyusunan proposal ini di antaranya yaitu Teknik penelitian lapangan (*field research*). Teknik penelitian ini dilakukan dengan cara peneliti terjun ke lapangan untuk melakukan penelitian dan untuk memperoleh data-data konkret terkait dengan objek penelitian.

1. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data di lapangan yang sesuai dengan data yang bersifat teknis, yakni sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah mengamati kejadian, gerak, atau proses.⁴⁵ Observasi dapat didefinisikan sebagai pengamatan dan pencatatan suatu objek dengan sistematis fenomena yang ada.⁴⁶ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap perilaku masyarakat Kelurahan Lakawan dalam mengembangkan UMKM.

⁴⁵ Suharsimi Arikunto, *Proses Penelitian Suatu Pendekatan*, Cet. XIII (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).

⁴⁶ Sukandarrumidi, *Metode Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2004).

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan informasi yang dilakukan oleh peneliti untuk mengidentifikasi permasalahan yang penting untuk dikaji. Wawancara kemudian dilakukan kembali untuk mengetahui hal-hal penting dari informan secara lebih mendalam.⁴⁷ Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan masyarakat Kelurahan Lakawan untuk menggali perspektif masyarakat didalam mengembangkan UMKM.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh catatan-catatan penting yang terkait dengan permasalahan penelitian. Catatan penting yang dimaksudkan adalah catatan dari kejadian-kejadian yang sudah berlalu. Adapun sumber-sumber data dokumen ini diperoleh dari buku, jurnal, skripsi, internet, dan dokumen resmi institut.⁴⁸

Dalam penelitian ini, peneliti mempelajari serta mendokumentasikan proses penelitian dalam bentuk, rekam suara, video maupun gambar.

2. Teknik Pengolahan Data

Adapun teknik pengolahan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini di antaranya sebagai berikut:

a. *Editing* (Pemeriksaan Data)

Editing merupakan proses pemindaian data-data yang telah dikumpulkan, terutama berdasarkan kelengkapan jawaban, kemudahan untuk dibaca, pemaknaan yang jelas, keselarasan dan relevansinya dengan data

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013).

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013).

lainnya.⁴⁹ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses *editing* dari hasil wawancara kepada informan yang berkaitan langsung dengan topik penelitian.

b. *Classifying* (Klasifikasi)

Classifying merupakan tahapan kategorisasi seluruh data baik yang diperoleh dari wawancara dengan subjek penelitian maupun observasi yang dilakukan di lapangan, hingga hasil dokumentasi. Semua data yang telah diperoleh tersebut dibaca kemudian dikaji secara mendalam. Setelah itu, data tersebut kemudian dikategorisasikan berdasarkan kebutuhan peneliti.⁵⁰ Tahapan-tahapan tersebut dilakukan agar data yang terkumpul dapat dengan mudah dibaca dan dimengerti oleh peneliti, sehingga peneliti dapat menemukan informasi yang objektif berdasarkan kebutuhan peneliti melalui data tersebut. Setelah itu, data-data tersebut dikelompokkan kedalam bagian-bagian yang memiliki persamaan berdasarkan data yang telah dikumpulkan melalui wawancara dan data yang didapatkan melalui referensi.

c. *Verifying* (verifikasi)

Verifying merupakan tahapan menguji data dan informasi yang telah dikumpulkan di lapangan supaya validitas data bisa diterima dan layak untuk digunakan dalam penelitian.⁵¹ Dalam penelitian ini, data yang bersumber dari informan diverifikasi supaya peneliti bisa mendapatkan data valid yang berkaitan langsung dengan fenomena yang ada di Kelurahan Lakawan.

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2015).

⁵⁰ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007).

⁵¹ Nana Saudjana and Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian* (Bandung: PT. Sinar Baru Argasindo, 2002).

d. *Concluding* (Kesimpulan)

Concluding yaitu tahapan paling akhir dalam proses pengolahan data. Kesimpulan tersebut yang kemudian akan menjadi sebuah informasi yang berhubungan dengan objek penelitian peneliti. Proses tersebut dikenal dengan istilah *concluding*, yakni kesimpulan atas proses pengolahan data yang mencakup empat proses dalam pengolahan data di antaranya *editing*, *classifying*, *verifying* dan *concluding*.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data yang tidak memiliki perbedaan antara data yang didapatkan peneliti dengan data yang terjadi sebenarnya pada objek penelitian, maka dari itu keabsahan data yang disajikan bisa dipertanggung jawabkan. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi: Uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.⁵² Dari uji keabsahan data tersebut penulis menggunakan uji *credibility* yakni seberapa besar data yang diperoleh dalam penelitian dapat dipercaya dan diterima kebenarannya. Dalam penelitian ini, uji kredibilitas dilakukan menggunakan triangulasi sumber.

Triangulasi sumber data adalah mengkaji kebenaran informasi tertentu dengan menggunakan beragam sumber data seperti, dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda. Kriteria yang dimaksudkan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

⁵² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2023).

1. *Credibility* (kepercayaan)

Kriteria ini untuk memenuhi data dan informasi yang informasi yang dikumpulkan mesti memiliki nilai kebenaran. Nilai kebenaran yang dimaksud adalah hasil penelitian kualitatif dapat dipercaya oleh para pembaca yang kritis dan dapat diterima oleh informan yang memberikan informasi. Peneliti akan melengkapi data yang telah dikumpulkan dari hasil observasi, wawancara, serta dokumentasi untuk memperoleh kebenaran yang valid dari data yang diperoleh.

2. *Transferability* (keteralihan)

Pada teknik keteralihan, penulis akan mengungkapkan hasil penelitian secara akurat dan jeli yang mencerminkan kondisi lokasi penelitian tersebut dilakukan dengan merujuk kepada fokus penelitian.⁵³ Maka dari itu, peneliti membuat laporan penelitian dengan menyajikan deskripsi terperinci dan jelas sehingga para informan dapat mengerti tentang penelitian yang dilakukan kemudian dapat mengungkapkan ketepatan pengaplikasian penelitian ini.

3. *Dependability* (ketergantungan)

Kriteria ketergantungan ini bisa diterapkan untuk mengidentifikasi apakah prosedur penelitian kualitatif berbobot atau tidak. Maka dari itu, peneliti akan menganalisis data dan teknik pengumpulan data. Analisis tersebut dilakukan untuk membuktikan kelogisan sehingga dapat memutuskan apakah hasil penelitian bisa dipertahankan (*dependable*).

⁵³ Hardani et al., *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020).

4. *Confirmability* (kepastian)

Kriteria kepastian merupakan sebuah prosedur kriteria peninjauan, yakni tahapan apa yang dipilih oleh peneliti dalam melaksanakan konfirmasi hasil penelitian.⁵⁴ Pengujian konfirmabilitas merupakan pengujian hasil penelitian yang berhubungan dengan proses penelitian yang dilakukan.

G. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam menganalisis data adalah analisis interaktif model yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Adapun langkah-langkah dalam proses analisis data tersebut di antaranya sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Pada tahap reduksi data, setiap peneliti akan mengacu pada tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan utama penelitian kualitatif terletak pada temuan. Oleh sebab itu, ketika peneliti melakukan penelitian kemudian menjumpai segala sesuatu yang terlihat janggal dan asing, malah itulah yang semestinya diperhatikan oleh peneliti dalam proses reduksi data.

Reduksi data adalah proses meringkas, menguraikan hal-hal pokok, memusatkan pada hal-hal yang penting, serta mencari tema dan polanya. Maka dari itu, data yang telah melewati tahapan reduksi akan menghasilkan gambaran yang lebih jelas, sehingga memudahkan peneliti dalam melaksanakan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari data apabila masih ada data yang

⁵⁴ Arnild Augina Mekarisce, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Masyarakat," *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat* 12, no. 3 (2020): 145–51.

diperlukan. Reduksi data bisa dilakukan dengan bantuan alat seperti *computer*, *notebook*, dan lain-lain.⁵⁵

2. *Display Data* (Penyajian Data)

Setelah melewati tahapan reduksi data, maka tahap selanjutnya adalah penyajian data. *Display data* dilakukan dalam bentuk deskripsi pendek, skema, hubungan antar kategori, diagram alur, dan sejenisnya. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa yang paling sering digunakan pada tahap *display data* dalam melakukan suatu penelitian kualitatif yakni teks yang bersifat naratif. Setelah melewati tahap penyajian data, maka peneliti akan lebih mudah untuk memahami suatu peristiwa, kemudian merencanakan pelaksanaan tahapan selanjutnya berdasarkan pemahaman peneliti dari penyajian data sebelumnya.⁵⁶

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahapan terakhir dalam analisis data pada penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman dalam Fitrah dan Lutfiyah adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang diperoleh masih bersifat sementara, kemudian dapat berubah apabila tidak terdapat bukti pendukung yang memperkuat pada tahap pengumpulan selanjutnya. Akan tetapi, apabila kesimpulan yang diperoleh pada tahap awal, diperkuat melalui bukti-bukti yang sah dan konstan ketika peneliti turun kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang diperoleh adalah kesimpulan yang andal.⁵⁷

⁵⁵ Umrati and Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan* (Makassar: Sekolah Tinggi Theologi Jaffrayr, 2020).

⁵⁶ Muh. Fitrah and Lutfiyah, *Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus)* (Bima: CV. Jejak, 2017).

⁵⁷ Muh. Fitrah And Lutfiyah, *Metode Penelitian (Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus)*.

Setelah peneliti mengumpulkan data-data dan beragam informasi yang dibutuhkan dari lapangan, selanjutnya peneliti akan mengolah secara sistematis sesuai dengan target dari permasalahan penelitian kemudian dilakukan analisis data. Setelah itu, dilakukan penarikan kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di lapangan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil penelitian

1. Prosedur Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam Mendukung Pengembangan UMKM di Kelurahan Lakawan, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang

Implementasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kelurahan Lakawan merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam menggerakkan sektor ekonomi mikro. Prosedur penyaluran KUR oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Cakke sebagai lembaga penyalur utama di wilayah ini dimulai dengan tahapan yang sangat terstruktur, yaitu observasi lapangan (OTS/on the spot), verifikasi dokumen, analisis kelayakan, keputusan kredit, penandatanganan akad, dan pencairan dana. Berdasarkan wawancara dengan petugas mantri dari BRI, OTS dilakukan secara langsung ke lokasi calon debitur untuk melihat kondisi riil usaha.

“Setelah itu dilakukan pemeriksaan dokumen, seperti KTP, kartu keluarga, NPWP, serta legalitas usaha yang meliputi Surat Izin Usaha atau bukti kegiatan usaha aktif. Calon debitur juga diwajibkan menunjukkan bahwa usaha tersebut produktif dan memiliki perputaran modal yang cukup sehat sebagai dasar penilaian kelayakan pinjaman yang diajukan”⁵⁸

Lebih jauh, proses persetujuan permohonan akan diproses apabila calon debitur memenuhi syarat administrasi dan hasil survei menunjukkan usaha layak didanai.

⁵⁸ Wawancara dengan Petugas Mantri BRI Unit Cakke, 22 April 2025.

“Dalam tahapan survei tersebut, pihak bank menerapkan prinsip analisis kelayakan berbasis metode 5C yaitu: *character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy*”⁵⁹

Prinsip ini digunakan untuk menilai kejujuran, kemampuan usaha, besaran modal, jaminan yang ditawarkan, serta konteks ekonomi lokal. Penandatanganan akad dilakukan apabila seluruh unsur terpenuhi, dan pencairan dana dilaksanakan dalam waktu berkisar 7–14 hari setelah survei, tergantung kelengkapan dokumen dan kondisi usaha.

Temuan lapangan melalui wawancara dengan sembilan pelaku UMKM mengonfirmasi adanya prosedur tersebut dan menggambarkan keterlibatan langsung dari petugas bank dalam proses penyaluran. Responden pertama, seorang pelaku usaha rumah tangga, menjelaskan bahwa pengajuan KUR menjadi titik balik dalam pengembangan usahanya.

“Kami awalnya memulai dari nol, hanya bermodalkan perlengkapan seadanya. Setelah dapat KUR, usaha bisa berkembang karena modal untuk bahan baku dan alat produksi terpenuhi,” tuturnya. Ia juga menambahkan bahwa pihak bank secara transparan menetapkan jadwal cicilan dan terbuka terhadap permohonan relaksasi ketika terjadi penurunan pendapatan, misalnya saat musim sepi⁶⁰.

Responden lainnya menyampaikan pengalaman serupa. Responden kedua menekankan pentingnya kemudahan prosedur awal saat dirinya mulai mengembangkan usaha. Dengan memanfaatkan dana KUR, ia mampu menambah stok dan membeli peralatan usaha, yang secara langsung berkontribusi terhadap stabilitas dan pertumbuhan usahanya⁶¹. Responden ketiga menyampaikan bahwa

⁵⁹ Wawancara dengan Petugas Mantri BRI Unit Cakke, 22 April 2025.

⁶⁰ Wawancara dengan Responden 1, pelaku usaha kuliner, 19 April 2025.

⁶¹ Wawancara dengan Responden 2, pelaku usaha perdagangan, 19 April 2025.

sebelum mengenal KUR, ia sempat menunda membuka usaha karena keterbatasan modal.

“Setelah dapat KUR, saya langsung beli kebutuhan usaha. Sekarang sudah jalan meski kadang turun omzet,” ujarnya. Ia memandang skema angsuran yang fleksibel dan bunga rendah sebagai keunggulan utama yang membuatnya merasa aman⁶².

Konsistensi pemahaman prosedur KUR juga terlihat dari jawaban responden keempat yang mengakui bahwa

“Bank memberi target pembayaran tiap bulan, tapi tidak memberatkan. Bahkan saat sempat macet, mereka beri waktu,” katanya. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penyaluran di lapangan dilakukan dengan pendekatan inklusif, yakni mengedepankan fleksibilitas tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian⁶³.

Adapun responden kelima menyoroti bahwa sebelum mendapatkan KUR, usahanya stagnan. Namun setelah pencairan, ia bisa menyewa tempat usaha dan memperbaiki tampilan produk, serta memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dibanding sebelumnya⁶⁴.

Aspek prosedural juga terkonfirmasi melalui pernyataan responden keenam yang menyatakan bahwa ia tidak memiliki jaminan besar untuk mengakses pinjaman bank komersial, namun KUR dianggap lebih ramah terhadap pelaku usaha kecil. Responden ini memuji proses pengajuan yang relatif mudah, dengan syarat administratif yang tidak memberatkan. Ia juga menilai bahwa pihak bank sangat responsif terhadap komunikasi aktif dari nasabah, khususnya saat terdapat kendala pelunasan⁶⁵. Sementara itu, responden ketujuh mengungkapkan bahwa dengan

⁶² Wawancara dengan Responden 3, pelaku usaha pertanian olahan, 20 April 2025.

⁶³ Wawancara dengan Responden 4, pelaku usaha produksi rumah tangga, 20 April 2025.

⁶⁴ Wawancara dengan Responden 5, pelaku usaha pengemasan produk, 20 April 2025.

⁶⁵ Wawancara dengan Responden 6, pelaku usaha rumahan, 21 April 2025.

modal KUR, ia berhasil mengembangkan usahanya dari skala rumahan menjadi memiliki kios kecil. Tanpa adanya skema KUR, menurutnya, hal tersebut mustahil tercapai. Ia menggarisbawahi bahwa bank tidak hanya bertindak sebagai kreditur, namun sebagai mitra pertumbuhan usaha⁶⁶.

Keseluruhan data menunjukkan bahwa implementasi prosedural KUR di Kelurahan Lakawan bersifat sistematis namun lentur, dengan mempertimbangkan konteks lokal, karakter pelaku usaha, dan tantangan sosial ekonomi yang mereka hadapi. Selain itu, pihak bank juga mengadopsi pendekatan humanistik dalam interaksi dengan pelaku UMKM, sebagaimana tercermin dalam pernyataan responden kedelapan yang mengaku bahwa saat pandemi, ia sempat mengajukan relaksasi dan permintaannya disetujui oleh pihak bank.

“KUR ini bukan cuma soal pinjaman, tapi kemitraan yang saling mendukung,” ujarnya⁶⁷.

Dari sisi kuantitatif, data dari pihak BRI menunjukkan bahwa setidaknya terdapat 231 pelaku UMKM di Kelurahan Lakawan yang telah menerima dana KUR. Hal ini menunjukkan bahwa program KUR memiliki jangkauan yang luas di wilayah ini⁶⁸. Namun, tantangan tetap ada. Salah satu tantangan utama adalah kemungkinan adanya ketidaksesuaian data antara dokumen dan fakta di lapangan, seperti debitur fiktif, peminjam yang menggunakan nama orang lain, atau dokumen yang tidak valid. Petugas BRI menyebut bahwa ketelitian dalam proses verifikasi menjadi sangat penting untuk menghindari risiko *moral hazard*⁶⁹.

⁶⁶ Wawancara dengan Responden 7, pelaku usaha kios kelontong, 21 April 2025.

⁶⁷ Wawancara dengan Responden 8, pelaku usaha kios kelontong, 21 April 2025.

⁶⁸ Wawancara dengan Petugas Mantri BRI Unit Cakke, op.cit.

⁶⁹ Wawancara dengan Petugas Mantri BRI Unit Cakke, op.cit.

Secara keseluruhan, prosedur penyaluran KUR di wilayah ini telah dijalankan sesuai dengan prinsip kehati-hatian perbankan dan tetap berpihak pada pelaku usaha kecil. Kehadiran bank tidak hanya sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai fasilitator pembangunan ekonomi lokal melalui UMKM. Data hasil wawancara mendukung bahwa keberhasilan implementasi ini dipengaruhi oleh tiga faktor kunci: (1) aksesibilitas prosedur, (2) pendekatan kooperatif dari lembaga penyalur, dan (3) ketepatan sasaran dalam verifikasi usaha.

Berikut Prosedur Kredit Usaha Rakyat :

1. Pengajuan Permohonan

Prosedur penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dimulai dengan tahap awal pengajuan permohonan oleh calon debitur, yang meliputi pengisian formulir dan penyertaan dokumen yang diperlukan seperti KTP, kartu keluarga, NPWP, serta legalitas usaha. Berdasarkan wawancara dengan beberapa pelaku UMKM, kebanyakan dari mereka merasa kesulitan pada tahap ini karena kurangnya pemahaman mengenai dokumen yang dibutuhkan. Salah satu responden menyatakan, "Saya pikir awalnya harus ada jaminan besar seperti pinjaman biasa. Ternyata bisa pakai usaha rumahan saja," yang menunjukkan kebingungan yang terjadi di antara pelaku usaha mengenai persyaratan administrasi yang diperlukan.

2. Observasi Lapangan (OTS)

Setelah permohonan diajukan, pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Cakke melakukan observasi lapangan (OTS) untuk menilai kondisi riil usaha yang akan dibiayai. OTS ini bertujuan untuk memverifikasi apakah usaha tersebut layak mendapatkan pembiayaan. Responden pertama, seorang pelaku usaha

rumah tangga, mengungkapkan, "Bank datang ke tempat usaha saya dan melihat langsung bagaimana usaha kami dijalankan. Mereka memperhatikan perputaran modal dan potensi usaha." Proses ini memastikan bahwa calon debitur memiliki usaha yang produktif dan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

3. Verifikasi Dokumen

Setelah OTS, pihak bank melakukan verifikasi dokumen untuk memastikan kelengkapan administratif dan keabsahan informasi yang diberikan. Responden kedua menambahkan, "Mereka memeriksa semua dokumen yang kami ajukan, seperti izin usaha dan bukti transaksi," yang menunjukkan bahwa tahap ini sangat penting untuk memastikan keabsahan data yang diajukan oleh debitur.

4. Analisis Kelayakan (Prinsip 5C)

Selanjutnya, pihak bank menerapkan analisis kelayakan usaha dengan menggunakan metode 5C, yaitu: character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy. Prinsip ini digunakan untuk menilai kejujuran, kapasitas usaha, besaran modal, jaminan yang ditawarkan, dan konteks ekonomi lokal. Salah satu petugas BRI menjelaskan, "Kami melihat apakah usaha calon debitur punya prospek jangka panjang, apakah usaha tersebut dapat berkembang dan mendukung perekonomian lokal." Berdasarkan hasil analisis ini, keputusan kredit akan dikeluarkan.

5. Keputusan Kredit dan Penandatanganan Akad

Jika usaha dinilai layak, keputusan kredit akan diberikan, dan calon debitur diminta untuk menandatangani akad pinjaman. Proses ini mencakup kesepakatan mengenai jumlah pinjaman, jangka waktu, serta ketentuan pembayaran. Responden ketiga menyatakan, "Setelah pengajuan diterima, saya langsung menandatangani akad pinjaman, dan saya diberitahukan tentang cicilan yang harus saya bayar setiap bulan." Hal ini menandakan bahwa semua informasi terkait dengan pinjaman disampaikan secara jelas kepada debitur.

6. Pencairan Dana

Setelah penandatanganan akad, pencairan dana dilakukan dalam rentang waktu 7 hingga 14 hari, tergantung pada kelengkapan dokumen dan kondisi usaha. Responden keempat mengungkapkan, "Setelah akad ditandatangani, saya mendapat dana KUR dalam waktu sekitar 10 hari, yang sangat membantu untuk mengembangkan usaha." Pencairan yang cepat ini menunjukkan bahwa bank dapat memenuhi kebutuhan pelaku UMKM secara efisien.

7. Fleksibilitas Pembayaran

Selama masa pembayaran, bank memberikan fleksibilitas dalam hal pembayaran angsuran. Jika ada kendala dalam pembayaran, bank akan memberikan relaksasi waktu pembayaran. Salah satu responden kelima menuturkan, "Bank memberi target pembayaran tiap bulan, tapi tidak memberatkan. Bahkan saat sempat macet, mereka beri waktu," yang menunjukkan pendekatan humanistik dalam pelaksanaan program ini, di mana

bank tidak hanya bertindak sebagai kreditur, tetapi juga sebagai mitra dalam membantu pelaku usaha melewati kesulitan.

8. Evaluasi dan Pengawasan

Selama masa pinjaman, bank melakukan evaluasi rutin untuk memastikan bahwa dana KUR digunakan sesuai dengan peruntukannya dan memberikan dampak positif terhadap perkembangan usaha. Petugas BRI mengonfirmasi, "Kami melakukan evaluasi pasca-pencairan untuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai tujuan, dan kami selalu siap membantu jika ada kendala."

Evaluasi ini penting untuk menjaga kualitas dan keberlanjutan program KUR.

Prosedur penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dimulai dari tahap awal pengajuan permohonan yang dilakukan oleh calon debitur dengan mengisi formulir dan melengkapi dokumen yang diperlukan, seperti KTP, kartu keluarga, NPWP, serta legalitas usaha. Selanjutnya, pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Cakke melakukan observasi lapangan (OTS) untuk menilai kondisi riil usaha yang akan dibiayai. Setelah itu, verifikasi dokumen dilakukan untuk memastikan kelengkapan administratif dan keabsahan informasi yang diberikan. Dalam proses ini, pihak bank menerapkan analisis kelayakan usaha dengan menggunakan prinsip 5C (character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy). Jika usaha dinilai layak, keputusan kredit dikeluarkan, dan calon debitur diminta untuk menandatangani akad pinjaman. Pencairan dana kemudian dilakukan dalam rentang waktu 7–14 hari setelah semua prosedur terpenuhi. Berdasarkan wawancara dengan beberapa pelaku UMKM, prosedur ini dijelaskan dengan sangat rinci oleh petugas bank, yang turut membantu debitur dalam memahami persyaratan dan tahapan yang harus dilalui. Sebagai contoh, salah satu responden

mengungkapkan bahwa, “Bank memberi target pembayaran tiap bulan, tapi tidak memberatkan. Bahkan saat sempat macet, mereka beri waktu,” yang menunjukkan fleksibilitas dalam pelaksanaan prosedur. Di sisi lain, tantangan yang dihadapi oleh beberapa pelaku UMKM, seperti ketidaksesuaian dokumen dan masalah moral hazard, mengindikasikan pentingnya ketelitian dalam verifikasi data dan pengawasan. Secara keseluruhan, prosedur ini tidak hanya mencakup langkah administratif yang baku, tetapi juga mengutamakan pendekatan humanistik dengan mempertimbangkan kondisi lokal dan karakteristik pelaku usaha, sebagaimana disampaikan oleh salah satu responden yang mengatakan, “KUR ini bukan cuma soal pinjaman, tapi kemitraan yang saling mendukung.” Hal ini menunjukkan bahwa bank, selain berperan sebagai pemberi kredit, juga berfungsi sebagai mitra yang mendukung perkembangan UMKM di wilayah tersebut.

2. Tantangan dan Hambatan yang Dihadapi oleh Pelaku UMKM dalam Mengakses dan Memanfaatkan Fasilitas KUR di Kelurahan Lakawan

Meskipun skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah dirancang untuk menjadi solusi pembiayaan yang inklusif bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Kelurahan Lakawan masih terdapat berbagai tantangan yang secara nyata menghambat efektivitas pemanfaatannya. Berdasarkan wawancara mendalam dengan para pelaku UMKM, aparat kelurahan, serta pihak bank, muncul sejumlah tema kunci yang mencerminkan kendala-kendala tersebut.

Salah satu hambatan utama yang diidentifikasi adalah rendahnya literasi keuangan dan pemahaman administrative dari sebagian pelaku UMKM. Berdasarkan keterangan dari responden-responden yang telah menerima KUR,

banyak di antara mereka awalnya merasa bingung atau bahkan takut mengajukan pinjaman karena tidak memahami proses, persyaratan, dan tanggung jawab hukum yang menyertainya. Responden ketiga, misalnya, menyatakan bahwa sebelum mendapatkan informasi dari tetangga yang telah lebih dahulu mengakses KUR, ia bahkan tidak mengetahui keberadaan program tersebut.

“Saya pikir awalnya harus ada jaminan besar seperti pinjaman biasa. Ternyata bisa pakai usaha rumahan saja,” ungkapnya⁷⁰.

Situasi ini diperparah dengan adanya asumsi keliru di masyarakat bahwa KUR merupakan bantuan sosial dari pemerintah, bukan kredit yang wajib dikembalikan. Hal ini menyebabkan sebagian pelaku usaha gagal memahami risiko keuangan jika tidak mampu memenuhi kewajiban angsuran. Petugas BRI mengonfirmasi bahwa ada kasus kredit macet yang disebabkan oleh peminjam yang tidak memiliki pemahaman memadai mengenai fungsi KUR. Bahkan dalam beberapa kasus ditemukan bahwa nama peminjam digunakan oleh pihak ketiga, sehingga dana tidak digunakan secara produktif sebagaimana mestinya⁷¹.

Hambatan kedua adalah kompleksitas persyaratan administratif. Walaupun secara formal persyaratan KUR lebih sederhana dibandingkan pinjaman komersial lainnya, pelaku UMKM yang tidak memiliki dokumen legal formal seperti izin usaha, catatan keuangan, atau bukti kepemilikan aset merasa kesulitan memenuhi syarat. Beberapa responden menyebut bahwa mereka harus dibantu oleh keluarga atau perangkat desa untuk menyiapkan dokumen. Responden keenam menjelaskan:

⁷⁰ Wawancara dengan Responden 3, pelaku usaha pertanian olahan, 20 April 2025.

⁷¹ Wawancara dengan Petugas Mantri BRI Unit Cakke, 21 April 2025.

“Kalau tidak ada yang bantu urus, mungkin saya tidak tahu harus mulai dari mana. Untung saja ada petugas kelurahan yang bantu bikin surat keterangan usaha,” ujarnya⁷².

Dari wawancara dengan pihak kelurahan, diperoleh informasi bahwa kelurahan memiliki keterbatasan dalam mendampingi secara aktif setiap pelaku UMKM. Salah satu aparat menjelaskan bahwa jumlah pelaku usaha cukup besar, sementara kapasitas kelurahan dari segi SDM sangat terbatas. Selain itu, kelurahan tidak secara rutin dilibatkan dalam proses sosialisasi formal oleh bank atau dinas koperasi.

“Kami hanya membantu kalau diminta, misalnya buat surat keterangan usaha. Selebihnya masyarakat harus datang sendiri ke bank,” jelasnya⁷³.

Tantangan lainnya berkaitan dengan kondisi ekonomi eksternal yang memengaruhi kelancaran pelunasan kredit. Sebagaimana diungkapkan oleh responden kedelapan, masa pandemi menyebabkan pendapatan usahanya menurun drastis. Ia pun sempat mengalami keterlambatan angsuran, meskipun kemudian diberikan relaksasi oleh pihak bank.

“Yang penting kita jujur, kasih tahu kondisi sebenarnya. Biasanya mereka (bank) bantu kasih waktu,” ujarnya⁷⁴.

Ini menunjukkan bahwa fleksibilitas dari pihak bank sangat penting dalam menjaga keberlangsungan hubungan kredit, namun tidak semua pelaku usaha memiliki keberanian atau inisiatif untuk melakukan komunikasi terbuka saat menghadapi kesulitan.

Aspek akses fisik terhadap informasi dan layanan keuangan juga menjadi faktor penghambat. Kelurahan Lakawan yang secara geografis berada di wilayah

⁷² Wawancara dengan Responden 6, pelaku usaha rumahan, 21 April 2025.

⁷³ Wawancara dengan Aparat Kelurahan Lakawan, 21 April 2025.

⁷⁴ Wawancara dengan Responden 8, pelaku usaha jasa, 21 April 2025.

perbukitan menjadikan akses ke bank atau instansi pendukung membutuhkan biaya dan waktu yang tidak sedikit, terutama bagi pelaku UMKM yang belum memiliki kendaraan pribadi atau akses digital. Hal ini mengindikasikan adanya ketimpangan dalam pemanfaatan program KUR antara pelaku usaha yang memiliki literasi dan akses yang baik dengan mereka yang berada di pinggiran informasi dan teknologi.

Secara umum, penelitian ini menunjukkan bahwa hambatan dalam pemanfaatan KUR bukan hanya berasal dari sisi prosedural atau teknis administratif, tetapi juga berakar pada struktur sosial ekonomi masyarakat, termasuk literasi keuangan yang rendah, ketergantungan pada pihak luar dalam mengurus dokumen, serta lemahnya inisiatif pelaku UMKM dalam mencari informasi atau menyampaikan kendala. Di sisi lain, pihak bank meskipun telah melakukan pendekatan berbasis lapangan dan evaluasi rutin, tetap menghadapi kendala dalam memastikan bahwa dana digunakan secara produktif dan tepat sasaran.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi KUR masih menghadapi tantangan serius dalam aspek edukasi, birokrasi, dan kultur sosial. Penanganan terhadap hambatan ini tidak cukup hanya dengan penyederhanaan prosedur, tetapi juga memerlukan intervensi multi-stakeholder, termasuk program pendampingan aktif dari kelurahan, edukasi keuangan dari dinas koperasi, serta pembentukan komunitas UMKM berbasis lokal yang dapat menjadi ruang bertukar informasi dan solusi.

Tantangan utama yang dihadapi pelaku UMKM dalam mengakses dan memanfaatkan fasilitas KUR di Kelurahan Lakawan, dapat dijelaskan lebih rinci

melalui wawancara yang dilakukan. Pertama, rendahnya literasi keuangan menjadi kendala yang signifikan. Banyak pelaku UMKM yang belum memahami secara mendalam tentang mekanisme dan persyaratan KUR. Sebagaimana diungkapkan oleh salah satu responden, "Saya pikir awalnya harus ada jaminan besar seperti pinjaman biasa. Ternyata bisa pakai usaha rumahan saja," ungkapnya. Hal ini mencerminkan kebingungan awal yang dirasakan oleh banyak pelaku usaha yang baru pertama kali mengenal KUR. Selain itu, adanya anggapan keliru bahwa KUR merupakan bantuan sosial dari pemerintah, yang mengarah pada pemahaman yang tidak sesuai mengenai kewajiban untuk mengembalikan pinjaman. Responden lain juga menyatakan, "Kami tidak tahu bahwa KUR itu kredit yang harus dibayar kembali. Kami pikir itu bantuan dari pemerintah."

Selain literasi yang rendah, tantangan kedua adalah ketidaktercukupannya dokumen legal formal yang sering kali menjadi persyaratan utama untuk pengajuan KUR. Salah satu responden mengungkapkan bahwa, "Kalau tidak ada yang bantu urus, mungkin saya tidak tahu harus mulai dari mana. Untung saja ada petugas kelurahan yang bantu bikin surat keterangan usaha," yang menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM masih mengandalkan bantuan dari pihak luar untuk memenuhi syarat administratif.

Selain itu, tantangan lainnya terkait dengan kesulitan fisik dalam mengakses layanan keuangan. Beberapa pelaku UMKM yang tinggal di daerah yang lebih terpencil di Kelurahan Lakawan mengeluhkan bahwa mereka harus

mengeluarkan biaya tambahan dan menghabiskan waktu yang lama untuk datang ke bank atau institusi terkait. Salah satu responden yang tinggal di daerah perbukitan mengungkapkan, "Akses ke bank cukup jauh dan kami harus mengeluarkan biaya untuk transportasi, sementara beberapa dari kami tidak memiliki kendaraan pribadi."

Dari wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa tantangan UMKM dalam mengakses KUR tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga sosial dan geografis. Minimnya pemahaman tentang KUR, keterbatasan dokumen legal, serta tantangan akses fisik, menjadi hambatan yang harus segera ditangani. Oleh karena itu, diperlukan intervensi lebih lanjut dari berbagai pihak terkait, termasuk penyederhanaan prosedur, peningkatan literasi keuangan, dan penguatan pendampingan di tingkat kelurahan untuk memastikan bahwa program KUR dapat diakses secara efektif oleh seluruh pelaku UMKM di wilayah tersebut.

3. Dampak Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap Pertumbuhan Usaha, Kapasitas Produksi, dan Pemberdayaan Ekonomi Pelaku UMKM di Kelurahan Lakawan

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tidak hanya berfungsi sebagai skema pembiayaan usaha, melainkan juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bagi pelaku UMKM di Kelurahan Lakawan, KUR memberikan pengaruh nyata terhadap tiga dimensi utama: pertumbuhan usaha, peningkatan kapasitas produksi, dan perluasan dampak sosial ekonomi. Narasi dari sembilan informan pelaku UMKM

memperlihatkan bagaimana akses terhadap pembiayaan mampu mendorong transformasi usaha dari tahap subsisten menuju tahap produktif yang lebih mapan.

Pertama, dari sisi pertumbuhan usaha, mayoritas responden menyatakan bahwa usaha mereka mengalami peningkatan yang signifikan setelah memperoleh fasilitas KUR. Responden pertama mengisahkan bagaimana usaha yang semula dijalankan secara sederhana dari rumah, perlahan dapat berkembang dengan memanfaatkan dana KUR untuk membeli bahan baku, memperbaiki alat produksi, dan memperluas pasar.

“Produksi kami bisa meningkat setelah ada modal tambahan dari KUR. Dulu hanya bisa jual sedikit, sekarang sudah mulai rutin ke pasar desa,” jelasnya⁷⁵.

Transformasi tersebut menandakan bahwa KUR mampu mengangkat UMKM dari kondisi stagnasi menuju ekspansi usaha yang lebih terstruktur.

Responden kedua menuturkan bahwa modal KUR digunakan untuk menambah stok dan memperbesar kapasitas penyimpanan bahan dagangan. Dampaknya adalah meningkatnya volume penjualan dan pendapatan yang lebih stabil.

“Saya bisa ambil barang dalam jumlah besar, jadi tidak bolak-balik belanja. Usaha pun jadi lebih untung,” ungkapnya⁷⁶.

Pernyataan ini memperlihatkan bahwa KUR secara konkret mendorong efisiensi operasional pelaku usaha, yang berujung pada peningkatan laba.

⁷⁵ Wawancara dengan Responden 1, pelaku usaha kuliner, 19 April 2025

⁷⁶ Wawancara dengan Responden 2, pelaku usaha perdagangan, 19 April 2025

Kedua, dalam aspek kapasitas produksi, para pelaku UMKM mengakui bahwa dana dari KUR digunakan untuk investasi dalam alat produksi dan fasilitas kerja. Responden keempat menjelaskan bahwa KUR dipakai untuk membeli peralatan utama dalam proses produksi makanan ringan, yang selama ini masih dilakukan secara manual.

“Sekarang bisa pakai alat bantu, hasilnya lebih banyak dan waktu produksi lebih singkat,” ujarnya⁷⁷.

Dengan kapasitas produksi yang meningkat, UMKM dapat memenuhi permintaan pasar dengan lebih konsisten dan terencana.

Responden kelima juga menyatakan bahwa dengan dana KUR, ia dapat menyewa tempat usaha yang lebih representatif serta meningkatkan tampilan produk melalui kemasan baru.

“Sebelumnya saya kemas seadanya. Setelah dapat KUR, saya coba ubah desain dan mulai promosi lewat media sosial. Ternyata banyak yang tertarik,” katanya⁷⁸.

Ini menunjukkan bahwa KUR berperan dalam mendorong pelaku UMKM untuk tidak hanya memproduksi lebih banyak, tetapi juga meningkatkan kualitas dan citra produk agar lebih kompetitif di pasar lokal.

Ketiga, dalam dimensi pemberdayaan ekonomi, penyaluran KUR memberikan dampak sosial yang meluas. Beberapa pelaku UMKM menyebut bahwa dengan berkembangnya usaha, mereka mulai merekrut tenaga kerja tambahan, baik dari keluarga maupun tetangga. Responden ketujuh misalnya,

⁷⁷ Wawancara dengan Responden 4, pelaku usaha produksi rumah tangga, 20 April 2025

⁷⁸ Wawancara dengan Responden 5, pelaku usaha pengemasan produk, 20 April 2025

mengungkap bahwa setelah usahanya berkembang dan memiliki kios, ia mempekerjakan satu orang untuk membantu menjaga toko.

“Lumayan bisa bantu orang sekitar juga,” ujarnya⁷⁹.

Dampak ini tidak hanya menciptakan pendapatan tambahan bagi pemilik usaha, tetapi juga membuka peluang kerja bagi komunitas sekitarnya.

Lebih jauh, pemberdayaan juga tercermin dalam peningkatan kepercayaan diri dan kemandirian pelaku UMKM. Responden kesembilan menyatakan bahwa KUR membantunya tidak hanya dari sisi finansial, tetapi juga dari sisi mental dan sosial. “Saya jadi lebih percaya diri mengelola usaha sendiri.

“Bahkan sekarang bisa ikut bazar dan undangan dari kelurahan,” katanya⁸⁰.

Hal ini memperlihatkan bahwa akses pembiayaan turut berkontribusi dalam membangun modal sosial dan kapasitas individu pelaku usaha.

Petugas bank pun menyatakan bahwa banyak UMKM yang mengalami peningkatan pendapatan pasca memperoleh KUR, meskipun tetap ada yang mengalami hambatan karena faktor eksternal. Evaluasi lapangan yang dilakukan BRI pasca pencairan memperlihatkan bahwa sebagian besar debitur menggunakan dana sesuai peruntukan, dan mengalami kenaikan omzet secara bertahap⁸¹. Temuan ini diperkuat dengan catatan kelurahan yang menunjukkan bahwa UMKM

⁷⁹ Wawancara dengan Responden 7, pelaku usaha kios kelontong, 21 April 2025

⁸⁰ Wawancara dengan Responden 9, pelaku usaha kerajinan, 21 April 2025

⁸¹ Wawancara dengan Petugas Mantri BRI Unit Cakke, 21 April 2025

penerima KUR lebih aktif dalam kegiatan perekonomian lokal dan forum-forum pelatihan usaha⁸².

Namun demikian, tidak semua usaha mengalami pertumbuhan yang seragam. Beberapa pelaku UMKM menyebut bahwa saat terjadi penurunan permintaan pasar, mereka mengalami kesulitan mencicil, walaupun pihak bank memberikan fleksibilitas waktu. Ini menunjukkan bahwa meskipun KUR mendorong pertumbuhan, daya tahan usaha terhadap risiko pasar tetap perlu diperkuat melalui pendampingan dan pelatihan manajemen. Oleh karena itu, keberhasilan dampak KUR harus dilihat tidak hanya dari sisi pencairan dana, tetapi dari keberlangsungan dan adaptasi usaha terhadap dinamika pasar.

Secara umum, hasil penelitian ini menegaskan bahwa penyaluran KUR di Kelurahan Lakawan telah memberi dampak yang substansial terhadap peningkatan kapasitas produksi, pertumbuhan usaha, dan pemberdayaan ekonomi pelaku UMKM. Dana KUR tidak hanya menjadi modal usaha, tetapi juga menjadi modal sosial dan psikologis bagi pelaku ekonomi kecil untuk berkembang secara mandiri dan berkelanjutan. Untuk itu, program KUR ke depan perlu disinergikan dengan edukasi kewirausahaan, fasilitasi pemasaran, dan penguatan jejaring komunitas UMKM berbasis lokal.

Secara umum, hasil penelitian ini menegaskan bahwa penyaluran KUR di Kelurahan Lakawan telah memberi dampak yang substansial terhadap peningkatan kapasitas produksi, pertumbuhan usaha, dan pemberdayaan ekonomi pelaku UMKM. Dana KUR tidak hanya menjadi modal usaha, tetapi juga menjadi modal sosial dan psikologis bagi pelaku ekonomi kecil untuk berkembang secara mandiri

⁸² Wawancara dengan Aparat Kelurahan Lakawan, 21 April 2025

dan berkelanjutan. Sebagai contoh, salah satu responden mengungkapkan, “Setelah dapat KUR, saya bisa menyewa tempat usaha yang lebih representatif dan memperbaiki tampilan produk,” yang menunjukkan bahwa dana KUR memungkinkan pelaku usaha untuk mengembangkan bisnis mereka ke tingkat yang lebih profesional. Selain itu, responden lainnya menambahkan, “Saya bisa membeli alat produksi baru yang sebelumnya tidak terjangkau,” yang menunjukkan bagaimana KUR berkontribusi pada peningkatan kapasitas produksi yang signifikan. Oleh karena itu, program KUR ke depan perlu disinergikan dengan edukasi kewirausahaan, fasilitasi pemasaran, dan penguatan jejaring komunitas UMKM berbasis lokal. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku UMKM tidak hanya mendapatkan pembiayaan, tetapi juga pendampingan yang berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing mereka di pasar.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Prosedur Penyaluran KUR dalam Mendukung Pengembangan UMKM

Prosedur penyaluran KUR di Kelurahan Lakawan memperlihatkan pola implementasi yang relatif sesuai dengan kerangka prosedural yang ditetapkan secara nasional oleh lembaga penyalur seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI). Skema yang dimulai dari tahap pengajuan, verifikasi dokumen, survei lapangan (OTS), analisis kelayakan usaha berbasis prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy*), hingga penandatanganan akad dan pencairan dana, membuktikan bahwa proses ini bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga menuntut pendekatan evaluatif yang cermat. Dalam konteks implementasi kebijakan, model pelaksanaan yang disampaikan oleh Nurdin Usman menekankan bahwa implementasi adalah aktivitas sistematis yang

dilandasi oleh tujuan dan indikator yang jelas, serta memerlukan interaksi antara pelaksana, penerima manfaat, dan lingkungan sosialnya⁸³. Hal ini terbukti relevan di lapangan, di mana pihak bank tidak hanya bertindak sebagai penyalur dana, tetapi juga sebagai fasilitator yang aktif dalam membangun hubungan kepercayaan dengan debitur melalui edukasi, survei, dan monitoring pasca-pencairan⁸⁴.

1. Prosedur Penyaluran KUR dalam Mendukung Pengembangan UMKM

Prosedur penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kelurahan Lakawan mencerminkan pelaksanaan yang cukup baik dengan mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI), sebagai lembaga penyalur utama. Prosedur ini terdiri dari serangkaian tahapan yang sangat terstruktur, yang dimulai dengan pengajuan permohonan oleh calon debitur dan diikuti oleh verifikasi dokumen, observasi lapangan (OTS), analisis kelayakan usaha berbasis prinsip 5C (character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy), penandatanganan akad, dan akhirnya pencairan dana. Skema ini tidak hanya administrasi, tetapi juga mempertimbangkan berbagai faktor sosial-ekonomi, serta memperhatikan kearifan lokal dalam setiap langkah pelaksanaannya.

Sebagai landasan teori dalam membahas prosedur ini, konsep implementasi kebijakan oleh Nurdin Usman memberikan kerangka yang

⁸³ Musmulyadi, Whistleblowing system dalam memutus rantai fraud untuk mewujudkan economic growth (Studi pada Direktorat Jenderal Pajak Indonesia). *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 2020, h.3(2), 292-303.

⁸⁴ Nurdin Usman, *Manajemen Implementasi Kebijakan Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2020), hlm. 38–40

relevan. Nurdin menjelaskan bahwa implementasi adalah aktivitas sistematis yang dipandu oleh tujuan yang jelas, serta indikator yang dapat diukur. Di dalamnya, terdapat hubungan yang kuat antara pelaksana kebijakan, penerima manfaat, dan interaksi sosial yang terjadi di lapangan. Dalam konteks KUR, Bank Rakyat Indonesia (BRI) berperan bukan hanya sebagai lembaga pemberi kredit, tetapi juga sebagai fasilitator pembangunan ekonomi lokal yang mendukung hubungan kepercayaan dengan pelaku UMKM melalui edukasi, survei lapangan, dan monitoring pasca-pencairan. Hal ini terlihat dari bagaimana bank mengedepankan hubungan manusiawi dengan para debitur dan memberikan solusi saat mereka mengalami kesulitan dalam pembayaran.

Sejalan dengan penelitian oleh Hardiyanti yang menyoroti implementasi KUR di wilayah pedesaan, ditemukan bahwa interaksi langsung antara petugas bank dan pelaku UMKM menjadi kunci keberhasilan program ini. Dalam penelitian ini, terdapat kesepakatan bahwa pendekatan komunikasi yang humanis dan interaksi langsung sangat menentukan efektivitas program, baik dari sisi administrasi maupun implementasi. Penelitiannya menunjukkan bahwa petugas bank di Kecamatan Alla mampu menjalin hubungan yang lebih dekat dengan pelaku UMKM, yang tidak hanya sekedar menerima dana, tetapi juga mendapatkan pendampingan dan edukasi mengenai pengelolaan keuangan dan usaha mereka.

Namun, implementasi penyaluran KUR juga tidak lepas dari tantangan. Dalam penerapannya, banyak UMKM yang merasa kesulitan pada tahap awal,

terutama dalam memenuhi persyaratan administrasi dan memahami tahapan pengajuan. Hal ini dikarenakan adanya gap antara pemahaman pelaku usaha dan prosedur yang berlaku. Sebagai contoh, banyak pelaku UMKM yang menganggap KUR sebagai bentuk hibah dan bukan kredit yang wajib dikembalikan. Ini mengarah pada kesalahan persepsi yang dapat mengganggu jalannya proses pembayaran cicilan nantinya. Untuk itu, edukasi yang lebih intensif mengenai perbedaan antara pinjaman dan bantuan sosial sangat penting untuk menghindari misunderstanding lebih lanjut.

Dari sudut pandang teori implementasi kebijakan, pendekatan yang lebih partisipatif dalam proses penyaluran KUR bisa memberikan hasil yang lebih efektif. Implementasi yang mengutamakan kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat lokal akan lebih menghasilkan kebijakan yang berpihak pada pelaku UMKM. Menurut teori kolaborasi kebijakan oleh Emerson dan Nabatchi, keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kolaborasi antara berbagai aktor, di mana aktor-aktor ini berkomunikasi, berbagi informasi, dan saling memberi dukungan. Dalam konteks KUR, kolaborasi yang efektif antara bank, kelurahan, dan Dinas Koperasi akan meningkatkan pemahaman UMKM terhadap kebijakan tersebut serta memastikan bahwa dana digunakan dengan tepat guna⁸⁵.

⁸⁵ A. Bahri., & Said, M. M. Expanding SME product export market through digital innovation in Indonesia. In *Dynamic strategies for entrepreneurial marketing* (Vol. 12, pp. 253-269), 2025, IGI Global Scientific Publishing.

2. Kelembagaan dan Keterlibatan Bank dalam Penyaluran KUR

Dalam prosedur penyaluran KUR di Kelurahan Lakawan, keterlibatan BRI Unit Cakke sebagai lembaga penyalur sangat penting. Bank berperan tidak hanya sebagai pemberi pinjaman, tetapi juga sebagai mitra strategis yang memberikan pemahaman tentang penggunaan dana, proses administrasi, serta kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur. Hal ini selaras dengan teori pemberdayaan ekonomi oleh arwin⁸⁶, yang menyatakan bahwa lembaga keuangan dapat berfungsi sebagai instrumen untuk memberdayakan masyarakat ekonomi kecil melalui pemberian akses terhadap modal usaha. Bank yang memfasilitasi pelatihan dan edukasi bagi pelaku UMKM memperlihatkan model pemberdayaan ekonomi yang inklusif.

Namun, meskipun bank memberikan pelatihan dan pengawasan, beberapa pelaku UMKM masih menemui kesulitan, terutama terkait dengan pemahaman administrasi dan dokumentasi yang diperlukan untuk pengajuan KUR. Ini mencerminkan perlunya sistem pendampingan yang lebih berkelanjutan, seperti penyuluhan rutin yang tidak hanya dilakukan di awal pengajuan, tetapi juga selama masa pengelolaan usaha, untuk menghindari potensi kesulitan dalam pembayaran atau penggunaan dana yang tidak sesuai.

⁸⁶ Arwin, A., Ulandari, D., & Muhammadun, M. Exploration of employee knowledge about financing products: A study at Bank Muamalat KC Parepare. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 2025, 10(2), 483-506.

3. Analisis Faktor Sosial Ekonomi dalam Implementasi KUR

Faktor sosial ekonomi pelaku UMKM di Kelurahan Lakawan turut mempengaruhi keberhasilan implementasi KUR. Mayoritas pelaku UMKM di daerah ini berasal dari sektor informal dengan modal terbatas, dan memiliki keterbatasan dalam mengakses layanan keuangan formal. Untuk itu, program KUR memberikan peluang yang sangat besar bagi mereka untuk mengakses pembiayaan dengan bunga rendah dan tanpa jaminan yang memberatkan. Menurut teori modal sosial oleh Putnam, hubungan sosial yang kuat di antara pelaku UMKM dan masyarakat sekitar, serta dukungan dari lembaga-lembaga terkait, mempercepat keberhasilan implementasi kebijakan ini. Di Kelurahan Lakawan, adanya interaksi antara pelaku usaha, petugas bank, dan aparat kelurahan memberikan kontribusi signifikan terhadap pemanfaatan KUR yang lebih efektif.

Namun, tantangan lain yang dihadapi oleh pelaku UMKM adalah rendahnya tingkat literasi keuangan dan kurangnya pemahaman mengenai pentingnya dokumen legal formal seperti izin usaha dan laporan keuangan. Salah satu responden menyatakan bahwa, "Kalau tidak ada yang bantu urus, mungkin saya tidak tahu harus mulai dari mana." Ini menunjukkan bahwa meskipun prosedur penyaluran KUR telah berjalan dengan baik, masih ada ketimpangan pemahaman antara pelaku usaha yang lebih teredukasi dan mereka yang berada di daerah kurang berkembang.

4. Pengaruh Fleksibilitas Pembayaran terhadap Pemberdayaan Ekonomi UMKM

Dalam implementasinya, fleksibilitas dalam sistem pembayaran angsuran merupakan salah satu aspek yang sangat membantu bagi pelaku UMKM. Petugas bank memberi kelonggaran waktu bagi debitur yang mengalami kesulitan, seperti yang diungkapkan oleh responden, "Bank memberi target pembayaran tiap bulan, tapi tidak memberatkan. Bahkan saat sempat macet, mereka beri waktu." Pendekatan ini berhubungan dengan teori resilience (ketahanan) ekonomi oleh Holling, yang menyatakan bahwa sistem ekonomi yang fleksibel dan adaptif dapat bertahan meskipun menghadapi perubahan kondisi eksternal. Bagi UMKM, fleksibilitas ini memberikan ruang untuk bertahan selama masa-masa sulit dan memastikan usaha tetap berjalan.

Namun, fleksibilitas ini hanya efektif apabila diiringi dengan pendidikan tentang pengelolaan keuangan yang lebih baik. Bank perlu memberikan lebih banyak dukungan dalam bentuk pelatihan atau workshop yang berkaitan dengan manajemen keuangan dan pengelolaan kredit. Hal ini penting untuk mengurangi risiko kegagalan bayar dan memastikan bahwa pinjaman KUR digunakan sesuai dengan tujuan.

5. Dampak KUR terhadap Peningkatan Kapasitas Produksi dan Pemberdayaan Tenaga Kerja

Berdasarkan wawancara dengan pelaku UMKM, KUR terbukti meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas peluang kerja. Sebagai

contoh, responden kelima menyatakan, "Setelah dapat KUR, saya bisa menyewa tempat usaha dan memperbaiki tampilan produk, serta memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dibanding sebelumnya." Selain itu, beberapa pelaku UMKM mulai merekrut tenaga kerja tambahan untuk membantu mereka mengelola usaha, seperti yang dikatakan oleh responden ketujuh, "Lumayan bisa bantu orang sekitar juga." Hal ini sesuai dengan teori pemberdayaan ekonomi yang menjelaskan bahwa akses terhadap modal dapat memperbesar kapasitas produksi dan membuka peluang kerja di masyarakat, yang pada gilirannya mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

6. Tindak Lanjut Pasca Pencairan KUR

Selain pencairan dana, bank juga melakukan evaluasi dan tindak lanjut untuk memantau penggunaan dana KUR oleh debitur. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati dan untuk menghindari risiko penyalahgunaan dana. Evaluasi lapangan yang dilakukan oleh petugas bank menunjukkan bahwa sebagian besar debitur menggunakan dana KUR untuk meningkatkan kapasitas produksi mereka⁸⁷. Namun, evaluasi ini juga menunjukkan bahwa beberapa UMKM mengalami hambatan dalam mencocokkan permintaan pasar dengan kapasitas produksi mereka, yang mengarah pada kesulitan dalam membayar angsuran.

⁸⁷ Inyoman Budiono., Bakar, A. A., Haddade, H., Daily, S., & Husain, H. *"Integrating local culture to work ethics: A holistic approach to mitigating problematic financing in Islamic banks"* BANCO, 2024, h.93-113. Institut Agama Islam Negeri Parepare.

7. Tantangan Pasca Pencairan KUR

Meskipun KUR memberikan dampak positif bagi banyak pelaku UMKM, beberapa pelaku usaha mengungkapkan bahwa mereka masih mengalami tantangan dalam hal ketahanan usaha terhadap fluktuasi pasar. Beberapa responden mengeluhkan bahwa ketika terjadi penurunan permintaan pasar, mereka kesulitan mencicil pinjaman, meskipun pihak bank memberikan fleksibilitas waktu. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun KUR telah memberikan akses modal, pelaku UMKM tetap membutuhkan pelatihan dalam manajemen risiko dan perencanaan bisnis untuk menjaga keberlanjutan usaha mereka.

Penemuan ini juga konsisten dengan penelitian Hardiyanti di Kecamatan Alla, yang menyatakan bahwa prosedur implementasi KUR di wilayah pedesaan berjalan cukup efektif selama didukung dengan interaksi langsung antara petugas bank dan pelaku UMKM. Kunci dari keberhasilan implementasi bukan hanya ada pada struktur birokrasi atau dokumen resmi, tetapi juga pada kualitas relasi interpersonal antara pelaksana dan penerima manfaat. Dalam penelitian ini, relasi tersebut terlihat pada fleksibilitas petugas bank dalam merespons kesulitan cicilan debitur, pemberian relaksasi, serta kemampuan mereka menjelaskan tanggung jawab hukum secara humanis. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa struktur prosedur penyaluran KUR di Kelurahan Lakawan secara substansial telah berjalan sesuai prinsip-prinsip implementasi kebijakan yang adaptif dan berbasis konteks lokal.

2. Tantangan dan Hambatan dalam Mengakses dan Memanfaatkan KUR

Kendati struktur prosedural telah tersedia dan secara umum berjalan dengan baik, pelaku UMKM di Kelurahan Lakawan tetap menghadapi berbagai tantangan yang menghambat efektivitas pemanfaatan program KUR. Hambatan utama yang muncul adalah rendahnya literasi keuangan, keterbatasan dokumen legal, dan pemahaman masyarakat yang masih keliru terhadap konsep KUR. Temuan ini sejalan dengan pernyataan Guntur Setiawan bahwa keberhasilan implementasi sangat tergantung pada dukungan dari sistem birokrasi, jaringan pelaksana, serta karakteristik kelompok target, dalam hal ini pelaku UMKM yang memiliki heterogenitas dalam latar belakang pendidikan, pengalaman usaha, dan akses terhadap informasi⁸⁸.

Penelitian oleh Siti Fatimah juga menguatkan temuan ini, dengan menekankan bahwa salah satu penyebab utama tidak optimalnya pemanfaatan KUR di daerah pedesaan adalah minimnya sosialisasi dan edukasi keuangan yang dilakukan oleh institusi penyalur. Hal ini diperparah oleh asumsi sosial yang berkembang bahwa KUR adalah bentuk bantuan sosial yang tidak perlu dikembalikan, sebagaimana juga muncul dalam wawancara lapangan. Dalam hal ini, peran lembaga lokal seperti kelurahan menjadi sangat penting untuk menjembatani komunikasi antara masyarakat dan pihak bank. Namun, data lapangan menunjukkan bahwa keterlibatan kelurahan masih bersifat pasif dan administratif, terbatas pada penerbitan surat keterangan usaha, tanpa ada pendampingan aktif yang terstruktur.

⁸⁸ Guntur Setiawan, *“Implementasi Kebijakan Publik dan Dinamika Pelaksanaannya”* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2021), hlm. 50

Perspektif ini memperkuat gagasan bahwa implementasi kebijakan keuangan mikro harus menasar dua aspek: instrumen formal (alur birokrasi, prosedur teknis) dan instrumen sosial (edukasi, pendampingan, pembentukan komunitas). Oleh sebab itu, optimalisasi KUR tidak cukup hanya melalui penyederhanaan prosedur, tetapi juga harus dibarengi dengan peningkatan kapasitas kelembagaan di tingkat lokal untuk menjalankan fungsi mediasi dan pemberdayaan. Dengan kata lain, keterbatasan akses terhadap program KUR mencerminkan tidak hanya masalah individu, tetapi juga lemahnya struktur pendukung sosial-ekonomi yang seharusnya hadir dalam bentuk kolaborasi antar-lembaga.

Kendati struktur prosedural penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah berjalan dengan baik, pelaku UMKM di Kelurahan Lakawan masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat efektivitas pemanfaatan program ini. Salah satu hambatan utama yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah rendahnya literasi keuangan di kalangan pelaku UMKM. Literasi keuangan yang rendah membuat banyak pelaku usaha kesulitan dalam memahami konsep dasar terkait pengelolaan pinjaman, bunga, serta kewajiban dalam pengembalian dana. Menurut teori literasi keuangan yang dikembangkan oleh Lusardi dan Mitchel ⁸⁹, pemahaman yang baik mengenai pengelolaan dana dan investasi adalah hal yang krusial dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Tanpa pengetahuan yang memadai, pelaku UMKM cenderung salah mengelola dana, bahkan ada yang menganggap KUR sebagai bentuk hibah dari pemerintah, bukan

⁸⁹ Lusardi, A., & Mitchell, O. S., “*The Economic Importance of Financial Literacy: Theory and Evidence*”, *Journal of Economic Literature*, 2014, h. 52(1)

sebagai pinjaman yang harus dikembalikan. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam membayar angsuran yang pada gilirannya meningkatkan risiko gagal bayar.

Penyuluhan dan pendidikan tentang literasi keuangan menjadi sangat penting untuk membantu pelaku UMKM mengelola pinjaman mereka dengan lebih efektif. Mandell dan Klein⁹⁰ dalam teori pendidikan keuangan mereka juga menegaskan bahwa program pendidikan yang melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses pembelajaran akan sangat membantu dalam meningkatkan pemahaman mereka tentang keuangan. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih berbasis pendidikan dalam sosialisasi KUR akan memaksimalkan pemahaman dan penggunaan program ini oleh pelaku UMKM.

Selain masalah literasi keuangan, keterbatasan dokumen legal juga menjadi hambatan signifikan bagi pelaku UMKM dalam mengakses KUR. Banyak dari mereka yang tidak memiliki izin usaha formal atau catatan keuangan yang jelas, yang menjadi syarat utama dalam pengajuan kredit. Hal ini menggambarkan tantangan besar dalam meningkatkan akses layanan keuangan bagi sektor informal, yang memang sebagian besar dari pelaku UMKM tidak memiliki legalitas usaha yang memadai. Menurut teori akses keuangan oleh Sen⁹¹, ketidakmampuan dalam memenuhi persyaratan administratif menyebabkan kelompok tertentu, terutama yang berada di sektor informal, sulit mengakses pembiayaan formal. Pemerintah dan lembaga penyalur KUR harus bekerja sama untuk memberikan edukasi kepada

⁹⁰ Mandell, L., & Klein, L. “*The Impact of Financial Literacy Education on Subsequent Financial Behavior*”, *Journal of Financial Counseling and Planning*, 2007, h. 18(1), 28-40.

⁹¹ Sen, A. “*Development as Freedom*”. Alfred A. Knopf.(1999)

pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha dan pencatatan keuangan yang baik, agar mereka bisa memenuhi persyaratan administrasi yang berlaku.

Ketimpangan ini juga menunjukkan perlunya peran pemerintah daerah, khususnya kelurahan, dalam memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM. Namun, data lapangan menunjukkan bahwa keterlibatan kelurahan dalam mendukung pengajuan KUR masih terbatas. Aparat kelurahan lebih berperan secara administratif, hanya membantu penerbitan surat keterangan usaha. Ini menggambarkan bahwa kelurahan belum optimal dalam menjalankan peran sebagai mediator yang menghubungkan masyarakat dengan lembaga keuangan. Teori pemerintahan lokal, seperti yang dikemukakan oleh Tschirhart et al⁹², menggarisbawahi pentingnya lembaga lokal dalam memfasilitasi implementasi kebijakan dan memastikan bahwa kebijakan yang ada dapat dijangkau oleh masyarakat. Untuk itu, perlu ada upaya yang lebih terstruktur untuk meningkatkan kapasitas kelurahan dalam memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM, mulai dari pemahaman administrasi hingga pendampingan dalam mengajukan pinjaman.

Tidak hanya itu, ketidakpahaman terhadap konsep KUR juga menjadi salah satu tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM. Banyak pelaku usaha yang menganggap bahwa KUR adalah bentuk bantuan sosial yang tidak perlu dikembalikan. Persepsi ini mengarah pada kesalahan dalam pengelolaan pinjaman, seperti menunda pembayaran atau menggunakannya untuk keperluan pribadi yang

⁹² Tschirhart, M., & Matthews, R. L., "The Role of Local Governments in Policy Implementation: A Framework for Effective Collaboration", *Public Administration Review*, 1995, h. 65(6), 640-655.

tidak terkait langsung dengan pengembangan usaha. Hal ini menunjukkan perlunya penjelasan yang lebih mendalam mengenai perbedaan antara pinjaman produktif dan bantuan sosial. Sebagai contoh, salah satu responden menyatakan, "Kami pikir KUR itu adalah bantuan dari pemerintah, jadi tidak perlu dikembalikan." Pernyataan ini menunjukkan betapa pentingnya peran lembaga penyalur dalam melakukan sosialisasi yang jelas tentang mekanisme KUR kepada pelaku usaha.

Dalam hal ini, teori sosialisasi kebijakan oleh Sabatier⁹³ menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kualitas sosialisasi dan komunikasi yang dilakukan oleh pihak yang berwenang. Sosialisasi yang jelas dan berkelanjutan akan memudahkan masyarakat dalam memahami dan memanfaatkan kebijakan yang ada. Oleh karena itu, penyuluhan yang lebih intensif dari bank dan pemerintah lokal terkait dengan kewajiban dan hak-hak yang dimiliki pelaku UMKM dalam program KUR sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan pemanfaatan program ini.

Tantangan lainnya yang dihadapi oleh pelaku UMKM adalah akses fisik yang terbatas terhadap layanan keuangan. Kelurahan Lakawan yang terletak di daerah perbukitan membuat sebagian pelaku UMKM kesulitan dalam mengakses layanan bank atau lembaga keuangan lainnya. Untuk mencapai bank atau lembaga penyalur KUR, mereka harus menempuh jarak yang jauh dan mengeluarkan biaya tambahan untuk transportasi. Beberapa responden mengungkapkan, "Akses ke bank cukup jauh dan kami harus mengeluarkan biaya untuk transportasi,

⁹³ Sabatier, P. A. *"Theories of the Policy Process"* (2nd ed.), Westview Press, (2007)

sementara beberapa dari kami tidak memiliki kendaraan pribadi." Hal ini mencerminkan adanya ketimpangan dalam pemanfaatan program KUR antara pelaku UMKM yang memiliki akses fisik ke bank dan mereka yang berada di daerah terpencil.

Teori ketimpangan akses oleh Glaeser et al ⁹⁴ menjelaskan bahwa ketidakmerataan akses terhadap layanan keuangan dapat memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi yang ada. Dalam hal ini, ketimpangan dalam akses terhadap layanan KUR akan menghambat peluang pelaku UMKM yang tinggal di daerah terpencil untuk mendapatkan manfaat dari program ini. Oleh karena itu, perlu ada inovasi dalam sistem distribusi layanan KUR, seperti peningkatan akses melalui layanan digital atau penggunaan agen bank yang dapat mendekatkan layanan keuangan kepada pelaku UMKM di daerah yang sulit dijangkau.

Pandemi COVID-19 juga memberikan tantangan besar bagi pelaku UMKM dalam membayar cicilan KUR. Banyak pelaku usaha yang mengalami penurunan pendapatan selama pandemi dan kesulitan dalam memenuhi kewajiban mereka. Meskipun bank memberikan fleksibilitas dalam hal waktu pembayaran, beberapa pelaku UMKM merasa bahwa mereka tetap kesulitan untuk menjaga kelangsungan usaha mereka. Responden kedelapan mengungkapkan, "Yang penting kita jujur, kasih tahu kondisi sebenarnya. Biasanya mereka (bank) bantu kasih waktu." Hal ini menunjukkan bahwa meskipun adanya fleksibilitas dari lembaga penyalur,

⁹⁴ Glaeser, E. L., Laibson, D. I., & Sacerdote, B, *An Economic Approach to Social Capital*. Economic Journal, 112(483), 437-458, (2003)

pelaku UMKM tetap perlu meningkatkan kemampuan dalam merencanakan keuangan mereka agar dapat bertahan dalam situasi krisis.

Dalam hal ini, teori resiliensi ekonomi (Holling) dapat diterapkan untuk menjelaskan bagaimana sistem ekonomi yang fleksibel dapat bertahan dan berkembang meskipun menghadapi guncangan eksternal. Program KUR yang memberikan kelonggaran dalam pembayaran cicilan dapat dilihat sebagai bentuk resiliensi dari sistem pembiayaan mikro yang membantu pelaku UMKM bertahan dalam masa sulit. Namun, untuk meningkatkan daya tahan pelaku UMKM, diperlukan pelatihan dalam perencanaan bisnis dan manajemen keuangan agar mereka lebih siap menghadapi tantangan ekonomi.⁹⁵

Secara keseluruhan, tantangan dalam mengakses dan memanfaatkan KUR di Kelurahan Lakawan mencerminkan masalah yang lebih besar terkait dengan struktur sosial-ekonomi, ketimpangan akses terhadap layanan keuangan, serta kurangnya pemahaman tentang kewajiban dalam program KUR. Untuk itu, diperlukan upaya lebih lanjut dari pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat lokal dalam meningkatkan literasi keuangan, memberikan pendampingan administratif, serta memastikan bahwa program KUR dapat diakses secara merata oleh seluruh pelaku UMKM di wilayah tersebut. Penanganan terhadap hambatan ini tidak cukup hanya dengan penyederhanaan prosedur, tetapi juga memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan berbasis kolaborasi antar-lembaga. Hal ini akan memastikan bahwa KUR dapat mencapai tujuannya dalam

⁹⁵ Holling, C. S. "Resilience and Stability of Ecological Systems", Annual Review of Ecology and Systematics, (1973) h. 123

memberdayakan UMKM dan meningkatkan perekonomian lokal secara berkelanjutan.

3. Dampak Penyaluran KUR terhadap Pertumbuhan Usaha dan Pemberdayaan Ekonomi

Dari hasil penelitian ini, ditemukan bahwa penyaluran KUR telah memberi kontribusi nyata terhadap pertumbuhan usaha pelaku UMKM, baik dalam hal peningkatan kapasitas produksi, ekspansi jaringan pemasaran, hingga penciptaan lapangan kerja. Penemuan ini sejalan dengan hasil penelitian Rina Maulida dan Joko Prasetyo yang menyatakan bahwa KUR memiliki korelasi positif terhadap peningkatan pendapatan dan skala usaha UMKM di Kabupaten Enrekang. Hal tersebut tercermin dalam data empiris di mana pelaku UMKM menggunakan dana KUR untuk membeli alat produksi, menyewa tempat usaha, memperbaiki kemasan, bahkan membangun kepercayaan diri untuk berinteraksi dengan pasar yang lebih luas.

Jika dikaji melalui perspektif pemberdayaan ekonomi, hasil penelitian ini mendukung teori Erni Febrina Harahap yang menjelaskan bahwa pemberdayaan mencakup bukan hanya dimensi finansial, tetapi juga penguatan kapasitas individu untuk berpartisipasi dalam sistem ekonomi secara aktif. Hal ini tergambar dari responden yang menyatakan bahwa mereka merasa lebih mandiri, percaya diri, dan mampu menyusun perencanaan usaha secara lebih profesional pasca menerima KUR⁹⁶. Dampak psikologis ini merupakan bentuk modal sosial yang penting dalam pembangunan ekonomi mikro berbasis masyarakat.

⁹⁶ Erni Febrina Harahap, "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat," *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* 3, no. 2 (2012): 78–96

Namun demikian, pemberdayaan tidak hanya diukur dari keberhasilan individu, tetapi juga dari keberlanjutan struktur usaha. Beberapa informan menyampaikan bahwa kendati usaha berkembang, mereka masih rentan terhadap dinamika pasar seperti fluktuasi harga bahan baku atau menurunnya daya beli masyarakat. Maka dari itu, keberhasilan program KUR perlu dilihat secara holistik bukan hanya dari pencairan dana dan peningkatan omzet jangka pendek, tetapi juga dari aspek keberlanjutan dan resiliensi usaha. Dalam hal ini, peran pelatihan, pembentukan komunitas UMKM, dan keterlibatan multi-aktor (bank, kelurahan, dinas koperasi) menjadi semakin penting untuk memperkuat keberhasilan program jangka panjang.

Secara konseptual, penelitian ini menunjukkan bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) tidak hanya berperan sebagai alat pembiayaan, tetapi juga sebagai mekanisme pengungkit (*leveraging mechanism*) untuk menciptakan transformasi sosial-ekonomi di tingkat mikro. Dengan demikian, strategi pengembangan UMKM ke depan harus memadukan pendekatan akses keuangan dengan penguatan kapasitas sosial dan kelembagaan, agar dampak program dapat lebih merata, inklusif, dan berkelanjutan.

Secara lebih mendalam, dampak positif KUR dapat dilihat dari aspek ekonomi dan sosial. Peningkatan kapasitas produksi, yang tercermin dari penggunaan dana untuk pembelian alat produksi dan perbaikan fasilitas usaha, menunjukkan bahwa KUR berfungsi sebagai alat pemberdayaan ekonomi yang memberikan akses kepada pelaku UMKM untuk berkembang. Selain itu, dana KUR memungkinkan pelaku UMKM untuk memperluas jaringan pemasaran mereka, baik secara lokal maupun melalui platform digital. Salah satu responden

mengungkapkan, "Dengan modal KUR, saya bisa menyewa tempat usaha dan memperbaiki tampilan produk, sehingga usaha saya lebih menarik di pasar." Peningkatan ini menunjukkan bahwa KUR bukan hanya memberikan modal kerja, tetapi juga memperkuat daya saing UMKM di pasar. Sebagaimana disebutkan dalam **Surah Al-Baqarah (2:261)**

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ
سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۚ ٢٦١

Terjemahnya:

"Perumpamaan (sedekah) yang dibelanjakan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, seperti sebutir biji yang menumbuhkan

Adapun dampak Penyaluran KUR terhadap pelaku UMKM yang menerima KUR adalah produksi mereka mengalami peningkatan karena dengan adanya suntikan dana, pelaku usaha dapat membeli bahan baku lebih banyak, menambah peralatan produksi, dan meningkatkan kualitas produk. Selain itu, mereka sudah mulai rutin menjual ke pasar desa, yang sebelumnya hanya mampu dijual dalam jumlah terbatas. Ini membuktikan bahwa usaha yang semula berskala kecil kini mulai menembus pasar yang lebih luas secara konsisten.

Sebelum mendapatkan KUR, pelaku usaha hanya mampu memproduksi atau menjual dalam jumlah kecil karena keterbatasan modal. Setelah menerima dana, volume produksi dan penjualan meningkat, yang otomatis berdampak pada naiknya omzet. Dana KUR tidak hanya berfungsi sebagai modal kerja, tetapi juga mendorong pelaku usaha untuk berinovasi dalam produk atau layanan,

memperbaiki kemasan dan branding, menambah saluran distribusi, seperti ke pasar desa atau online, semua faktor ini berkontribusi terhadap peningkatan daya saing usaha, yang pada akhirnya berujung pada kenaikan omzet secara bertahap dan berkelanjutan.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai *Implementasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam Pengembangan UMKM di Kelurahan Lakawan, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang*, maka dapat disimpulkan bahwa program KUR memiliki peran yang signifikan dalam mendukung sektor usaha mikro, kecil, dan menengah, meskipun masih terdapat berbagai tantangan dalam pelaksanaannya.

1. Prosedur Penyaluran KUR dalam Mendukung Pengembangan UMKM

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Cakke sebagai lembaga penyalur telah melaksanakan tahapan implementasi KUR secara sistematis dan sesuai dengan standar operasional. Prosedur penyaluran dimulai dari tahapan observasi lapangan (OTS), verifikasi dokumen, analisis usaha menggunakan pendekatan 5C, penandatanganan akad, hingga pencairan dana. Mekanisme ini menunjukkan bahwa implementasi KUR bersifat responsif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, dengan adanya fleksibilitas dalam penyusunan jadwal angsuran dan pemberian relaksasi jika ditemukan kendala. Pihak bank berperan aktif dalam membangun komunikasi yang baik dengan debitur, sehingga proses

penyaluran tidak hanya bersifat transaksional, tetapi juga mengandung unsur pembinaan dan pendampingan.

2. Tantangan dan Hambatan dalam Mengakses dan Memanfaatkan KUR

Dalam hal tantangan dan hambatan, ditemukan bahwa keterbatasan literasi keuangan, kesalahpahaman tentang sifat program KUR, dan kelengkapan dokumen administratif menjadi kendala utama bagi pelaku UMKM. Banyak pelaku usaha masih belum memahami prosedur pengajuan secara menyeluruh, bahkan beberapa mengira bahwa KUR adalah bentuk hibah, bukan pinjaman produktif yang wajib dikembalikan. Di sisi lain, kapasitas lembaga pendukung seperti kelurahan masih terbatas dalam menjalankan fungsi pendampingan yang berkelanjutan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan informasi, serta kebutuhan akan sistem kolaborasi lintas lembaga antara bank, pemerintah daerah, dan masyarakat agar penyaluran KUR dapat lebih tepat sasaran dan berdaya guna secara maksimal.

3. Dampak Penyaluran KUR terhadap Pertumbuhan Usaha dan Pemberdayaan

Ekonomi, dampak penyaluran KUR terhadap pengembangan usaha dan pemberdayaan ekonomi cukup signifikan. Mayoritas pelaku UMKM yang menerima KUR mengalami pertumbuhan usaha, peningkatan kapasitas produksi, hingga penciptaan lapangan kerja di lingkup lokal. Selain aspek ekonomi, KUR juga berkontribusi terhadap peningkatan rasa percaya diri dan kapasitas manajerial pelaku usaha. Dalam jangka panjang, KUR terbukti menjadi instrumen strategis untuk memperkuat ketahanan ekonomi

masyarakat berbasis usaha kecil dan menengah. Namun demikian, keberhasilan jangka panjang memerlukan sinergi dengan program pelatihan, edukasi kewirausahaan, serta penguatan kelembagaan lokal untuk menjamin keberlanjutan dampaknya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan di atas, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak lembaga penyalur (Bank Rakyat Indonesia), diharapkan untuk terus meningkatkan intensitas sosialisasi dan edukasi keuangan kepada masyarakat, terutama terkait pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam program KUR. Pelatihan manajemen keuangan sederhana, strategi pemasaran, dan literasi digital sebaiknya menjadi bagian terpadu dari layanan pembiayaan, agar debitur dapat mengelola usahanya secara lebih profesional dan berkelanjutan.
2. Kepada Pemerintah Kelurahan Lakawan, diharapkan lebih aktif dalam membentuk unit pendamping UMKM berbasis masyarakat. Kelurahan dapat menjadi mitra strategis dalam membantu pelaku usaha menyiapkan dokumen administratif, menyusun rencana usaha, serta menjembatani komunikasi antara UMKM dengan pihak bank atau dinas terkait. Diperlukan pelatihan bagi aparat kelurahan agar mereka memiliki pemahaman dasar mengenai skema pembiayaan seperti KUR.
3. Kepada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Enrekang, perlu memperkuat intervensi kelembagaan melalui penyediaan program pembinaan terpadu

berbasis wilayah. Kegiatan seperti pelatihan kewirausahaan, pengelolaan laporan keuangan, dan penguatan jejaring usaha harus menjadi program rutin dan tidak terbatas hanya pada momen tertentu. Selain itu, perlu dilakukan pemetaan UMKM berdasarkan sektor potensial agar bantuan pembiayaan dan pelatihan lebih terarah dan terukur.

4. Kepada pelaku UMKM: Perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya pencatatan keuangan, legalitas usaha, dan penggunaan dana secara disiplin dan terencana. Pelaku UMKM juga diharapkan lebih proaktif dalam mencari informasi terkait peluang pembiayaan dan bersedia mengikuti pelatihan atau pendampingan yang diselenggarakan oleh pihak terkait.
5. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas wilayah kajian agar dapat membandingkan implementasi KUR di wilayah dengan karakteristik sosial ekonomi yang berbeda. Selain itu, pendekatan kuantitatif juga dapat digunakan untuk mengukur dampak KUR secara statistik terhadap indikator seperti peningkatan omzet, efisiensi usaha, atau penyerapan tenaga kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, W. C., Ningtiyas, W. P., Alimah, M., & Universitas Muhammadiyah Malang. (2021). Kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan UMKM di masa pandemi Covid-19 di Indonesia. *Journal of Government and Politics (JGOP)*, 3(1), 47-65.
- Arfianto, A. E. W., & Balahmar, A. R. U. (2014). Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan ekonomi desa. *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, 2(1), 53-66. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v2i1.408>.
- Arwin, A., Ulandari, D., & Muhammadun, M. (2025). Exploration of employee knowledge about financing products: A study at Bank Muamalat KC Parepare. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 10(2), 483-506.
- Augina Mekarisce, A. (2020). Teknik pemeriksaan keabsahan data pada penelitian kualitatif di bidang masyarakat. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, 12(3), 145-151.
- Budiono, I. N., Bakar, A. A., Haddade, H., Daily, S., & Husain, H. (2024). Integrating local culture to work ethics: A holistic approach to mitigating problematic financing in Islamic banks. *BANCO*, 93-113. Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Clarisa Wetik, J. (2017). Kredit Usaha Rakyat. *Kinabalu*, 11(2), 50-57.
- Fatimah, S. (2023). Optimalisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di daerah pedesaan. *Jurnal Pembangunan Ekonomi*, 5(2), 1-15.
- Febrina Harahap, E. (2012). Pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam perspektif pembangunan sosial. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 3(2), 78-96.
- Fitrah, M., & Lutfiyah. (2017). Metode penelitian (Penelitian kualitatif, tindakan kelas dan studi kasus). CV Jejak.
- Granovetter, M. (1985). Economic action and social structure: The problem of embeddedness. *American Journal of Sociology*, 91(3), 481-510.
- Hastuti, P., & dkk. (2021). Kewirausahaan dan UMKM. Yayasan Kita Menulis.

- Holling, C. S. (1973). Resilience and stability of ecological systems. *Annual Review of Ecology and Systematics*, 4, 1-23. <https://doi.org/10.1146/annurev.es.04.110173.000245>
- Howlett, M., & Ramesh, M. (2003). *Studying public policy: Policy cycles and policy subsystems*. Oxford University Press.
- Isti, D. N., Komar, O., & Heryanto, N. (2017). Persepsi dan partisipasi masyarakat terhadap pemanfaatan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Kertajaya Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat. *Pendidikan Luar Sekolah*, 1(1), 52-62.
- Jeanne Clarisa Wetik, W. (2017). Kredit Usaha Rakyat. *Kinabalu*, 11(2), 50-57.
- Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2014). The economic importance of financial literacy: Theory and evidence. *Journal of Economic Literature*, 52(1), 5-44. <https://doi.org/10.1257/jel.52.1.5>
- Mekarisce, A. A. (2020). Teknik pemeriksaan keabsahan data pada penelitian kualitatif di bidang masyarakat. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, 12(3), 145-151.
- Mandell, L., & Klein, L. (2007). The impact of financial literacy education on subsequent financial behavior. *Journal of Financial Counseling and Planning*, 18(1), 28-40.
- Ma'ruf, M., Ikhbaluddin, I., Suripto, S., & Abdurrohman, A. (2021). Pengembangan kapasitas (capacity building) usaha kecil dan menengah bidang pertanian di Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor. *J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan)*, 6, 16-32. <https://doi.org/10.33701/j-3p.v6i1.1512>.
- Moleong, L. J. (2007). *Metode penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Musmulyadi, M. (2020). Whistleblowing system dalam memutus rantai fraud untuk mewujudkan economic growth (Studi pada Direktorat Jenderal Pajak Indonesia). *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 3(2), 292-303.
- Nabawi, N., & Basuki, B. (2022). Kualitas sumber daya manusia dan modal usaha pengaruhnya terhadap pengembangan usaha UMKM. *AL-ULUM: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 8(1), 111-120. <https://doi.org/10.31602/alsh.v8i1.6837>.

- Nana Saudjana, & Kusuma, A. (2002). *Proposal penelitian*. PT. Sinar Baru Argasindo.
- Pasolong, H. (2023). *Teori pengambilan keputusan*. Penerbit Alfabeta.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon & Schuster.
- Prasetyo, M. A. M., Bashori, B., & Masriani, M. (2020). Model capacity building pada pesantren perbatasan binaan Dinas Pendidikan Dayah Provinsi Aceh. *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 14(1), 71-96. <https://doi.org/10.18326/infsl3.v14i1.71-96>.
- Rendi Astuti, K. (2019). Infrastruktur dan teknologi dorong kemajuan UMKM. *Forum Manajemen*, 17(2), 71-86. <https://doi.org/10.61938/fm.v17i2.333>.
- Sabatier, P. A. (2007). *Theories of the policy process* (2nd ed.). Westview Press.
- Sugiyono. (2015). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. (2006). *Proses penelitian suatu pendekatan* (Cet. XIII). Rineka Cipta.
- Swardiansyah. (2020). Dampak pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap perkembangan pelaku UMKM di Kota Mataram 2021. *Skripsi*.
- Tim Penyusun. (2023). *Pedoman penulisan karya ilmiah IAIN Parepare*. IAIN Parepare Nusantara Press.
- Ummah, M. S. (2019). *Strategi pemberdayaan UMKM*. Sustainability (Switzerland), 11(1), 1-14.
- Ulfa, M., & Mulyadi, M. (2020). Analisis dampak kredit usaha rakyat pada sektor usaha mikro terhadap penanggulangan kemiskinan di Kota Makassar. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 11(1), 17-28.

- Wicaksono, K. (2017). Partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata (Dewi) Menari Dusun Tanon Desa Ngrawan Kecamatan Getasan. *Forum Manajemen*, 17(2), 71-86.
- Wijaya, U., & Hengki, W. (2020). *Analisis data kualitatif teori konsep dalam penelitian pendidikan*. Sekolah Tinggi Theologi Jaffrayr.







DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
NOMOR : B-4822/In.39/FEBI.04/PP.00.9/11/2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR MAHASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAEREPARE

- Menimbang
- Bahwa untuk menjamin kualitas skripsi/tugas akhir mahasiswa FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN Parepare, maka dipandang perlu penetapan pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa tahun 2024
 - Bahwa yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk disertai tugas sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa.
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor: 394 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Studi;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Memperhatikan :
- Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-025.04.2.307381/2024, tanggal 24 November 2023 tentang DIPA IAIN Parepare Tahun Anggaran 2024
 - Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor: 361 Tahun 2024, tanggal 21 Pebruari 2024 tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam;
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan :
- Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2024
 - Menunjuk saudara: **Misdar, MM**, sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir bagi mahasiswa :
 Nama Mahasiswa : MIFTAHUL JANNAH
 NIM : 2120203861206127
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Judul Penelitian : IMPLEMENTASI PENYALURAN KUR DALAM PENGEMBANGAN UMKM DI KELURAHAN LAKAWAN, KECAMATAN ANGGERAJA, KABUPATEN ENREKANG
 - Tugas pembimbing adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa mulai pada penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi/tugas akhir;
 - Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja IAIN Parepare;
 - Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Parepare
Pada tanggal 15 November 2024

Dekan,



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-1744/In.39/FEBI.04/PP.00.9/05/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

14 Mei 2025

Yth. BRI UNIT CAKKE
di
KAB. ENREKANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: MIFTAHUL JANNAH
Tempat/Tgl. Lahir	: SOSSOK, 13 Pebruari 2003
NIM	: 2120203861206127
Fakultas / Program Studi	: Ekonomi dan Bisnis Islam / Perbankan Syariah
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: KELURAHAN MATARAN,KECAMATAN ANGGERAJA,KABUPATEN ENREKANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah BRI UNIT CAKKE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

IMPLEMENTASI PENYALURAN KUR DALAM PENGEMBANGAN UMKM DI KELURAHAN LAKAWAN,KECAMATAN ANGGERAJA,KABUPATEN ENREKANG

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 20 Mei 2025 sampai dengan tanggal 20 Juni 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare



PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sudirman, Km 3 Pinang Telp./Fax (0420) 21079

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
 Nomor: 73.16/1361/DPMTSP/ENR/IP/V/2025

Berdasarkan Peraturan Bupati Enrekang nomor 73 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Enrekang Nomor 159 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang, maka dengan ini memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

MIFTAHUL JANNAH

Nomor Induk Mahasiswa	: 2120203861206127
Program Studi	: PERBANKAN SYARIAH
Lembaga	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
Pekerjaan Peneliti	: MAHASISWA
Alamat Peneliti	: SOSSOK
Lokasi Penelitian	: KELURAHAN LAKAWAN, KECAMATAN ANGGERAJA, KABUPATEN ENREKANG
Anggota/Pengikut	: -

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka **MENYUSUN SKRIPSI** dengan Judul :

IMPLEMENTASI PENYALURAN KUR DALAM PENGEMBANGAN UMKM DI KELURAHAN LAKAWAN, KECAMATAN ANGGERAJA, KABUPATEN ENREKANG

Lamanya Penelitian : 2025-05-20 s/d 2025-06-20

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
3. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Enrekang
 15/05/2025 10:09:49
 KEPALA DINAS.



Dr. Ir. CHAIDAR BULU, ST, MT
 Pangkat: Pembina Utama Muda
 NIP. 19750528 200212 1 005

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Enrekang sebagai laporan
2. Kepala Bakesbangpol Kab. Enrekang
3. Desa/Lurah/Camat tempat meneliti
4. Mahasiswa ybs.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : MIFTAHUL JANNAH
 NIM : 2120203861206127
 FAKULTAS/PRODI : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM / PERBANKAN SYARIAH
 JUDUL : IMPLEMENTASI PENYALURAN KUR DALAM PENGEMBANGAN UMKM DI KELURAHAN LAKAWAN, KECAMATAN ANGGERAJA, KABUPATEN ENREKANG.

PEDOMAN WAWANCARA

I. Wawancara Untuk Pelaku UMKM

No	Fokus Pertanyaan	Pertanyaan Wawancara
1	Latar belakang usaha	Bisa diceritakan bagaimana awal mula Bapak/Ibu memulai usaha ini?
2	Pengetahuan tentang KUR	Apakah Bapak/Ibu pernah mendengar tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR)?
3	Pengalaman mengakses KUR	Apakah Bapak/Ibu pernah mencoba mengajukan KUR? Bagaimana prosesnya?
4	Faktor pendukung	Apa saja kemudahan atau bantuan yang Bapak/Ibu rasakan saat mengakses KUR?
5	Kendala yang dihadapi	Apa kendala yang paling terasa saat mengajukan atau menggunakan dana KUR?

6	Pemanfaatan dana	Dana KUR digunakan untuk apa saja dalam usaha Bapak/Ibu?
7	Dampak terhadap usaha	Sejauh mana KUR berpengaruh terhadap pertumbuhan atau perkembangan usaha Bapak/Ibu?
8	Pendampingan/pelatihan	Apakah ada pihak dari lembaga atau instansi yang mendampingi selama menjalankan KUR?
9	Manajemen keuangan usaha	Bagaimana Bapak/Ibu mencatat pengeluaran dan pemasukan usaha?
10	Harapan terhadap program KUR	Harapan apa yang ingin Bapak/Ibu sampaikan untuk perbaikan program KUR ke depan?

II. Wawancara Untuk Petugas Bank/Penyalur KUR

No	Fokus Pertanyaan	Pertanyaan Wawancara
1	Mekanisme penyaluran KUR	Bagaimana prosedur standar penyaluran KUR kepada pelaku UMKM di daerah ini?
2	Kriteria kelayakan debitur	Apa saja syarat utama yang wajib dipenuhi oleh calon penerima KUR?
3	Jumlah dan tren debitur KUR	Berapa jumlah UMKM di Kelurahan Lakawan yang telah mendapatkan KUR?
4	Tingkat keberhasilan program KUR	Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap efektivitas KUR di daerah ini?
5	Tingkat kredit macet (NPL)	Apakah ada kasus kredit macet? Apa penyebab utamanya?
6	Upaya sosialisasi dan pendampingan	Apakah pihak bank aktif melakukan sosialisasi atau pelatihan kepada calon debitur KUR?
7	Hambatan penyaluran KUR	Apa saja tantangan yang sering dihadapi dalam proses penyaluran KUR di lapangan?
8	Evaluasi program	Adakah mekanisme evaluasi keberhasilan KUR bagi penerima?
9	Harapan dan saran	Apa saran dari pihak bank untuk meningkatkan

No	Fokus Pertanyaan	Pertanyaan Wawancara
		efektivitas penyaluran KUR ke UMKM lokal?

III. Wawancara Untuk Aparat Kelurahan/Pendamping UMKM

No	Fokus Pertanyaan	Pertanyaan Wawancara
1	Profil UMKM di wilayah	Bagaimana gambaran umum UMKM di Kelurahan Lakawan menurut data kelurahan?
2	Peran kelurahan dalam pengembangan UMKM	Apa saja bentuk dukungan yang diberikan kelurahan terhadap pelaku UMKM?
3	Pengetahuan tentang KUR	Apakah Kelurahan terlibat dalam sosialisasi atau fasilitasi program KUR?
4	Kendala yang dihadapi pelaku usaha	Apa saja keluhan atau kendala yang sering disampaikan oleh pelaku UMKM terkait KUR?
5	Kolaborasi dengan bank dan dinas	Adakah kerja sama aktif antara kelurahan dan pihak bank atau dinas koperasi?
6	Harapan untuk program pembiayaan	Apa harapan kelurahan dalam mendukung UMKM melalui program pembiayaan seperti KUR?

Parepare, 20 Februari 2025

Mengetahui,

Pembimbing Utama



Misdar.M.M
NIDN:2110117902

Surat Keterangan Wawancara

Nama : RESKI ALVIAN

Umur : 91

Alamat : Cakke

Menerangkan bahwa,

Nama : MIFTAHUL JANNAH

Nim : 2120203861206127

Prodi : Perbankan Syariah

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul “Implementasi Penyaluran KUR Dalam Pengembangan UMKM Di Kelurahan Lakwan, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang”

Dengan demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cakke,



Reski Alvia

Surat Keterangan Wawancara

Nama : *Meisyi Febrianti*

Umur : *26*

Alamat : *Cakke*

Menerangkan bahwa,

Nama : MIFTAHUL JANNAH

Nim : 2120203861206127

Prodi : Perbankan Syariah

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Implementasi Penyaluran KUR Dalam Pengembangan UMKM Di Kelurahan Lakwan, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang"

Dengan demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cakke,



Meisyi Febrianti

Surat Keterangan Wawancara

Nama : *ALMARIEF*

Umur : *31*

Alamat : *Cakke*

Menerangkan bahwa,

Nama : MIFTAHUL JANNAH

Nim : 2120203861206127


Prodi : Perbankan Syariah

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Implementasi Penyaluran KUR Dalam Pengembangan UMKM Di Kelurahan Lakwan, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang"

Dengan demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cakke,

PAREPARE



Surat Keterangan Wawancara

Nama : *NUR FAIDAH*

Umur : *27*

Alamat : *CAKKE*

Menerangkan bahwa,

Nama : MIFTAHUL JANNAH

Nim : 2120203861206127

Prodi : Perbankan Syariah

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul “Implementasi Penyaluran KUR Dalam Pengembangan UMKM Di Kelurahan Lakwan, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang”

Dengan demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cakke,


Nur Faidah

Surat Keterangan Wawancara

Nama : ISWADI IDRIS

Umur : 31

Alamat : Cakke

Menerangkan bahwa,

Nama : MIFTAHUL JANNAH

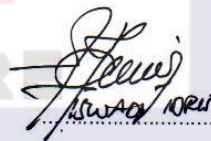
Nim : 2120203861206127

Prodi : Perbankan Syariah

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Implementasi Penyaluran KUR Dalam Pengembangan UMKM Di Kelurahan Lakwan, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang"

Dengan demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cakke,



Iswadi Idris

Surat Keterangan Wawancara

Nama : MISPAWATI

Umur : 53

Alamat : Cakke

Menerangkan bahwa,

Nama : MIFTAHUL JANNAH

Nim : 2120203861206127

Prodi : Perbankan Syariah

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Implementasi Penyaluran KUR Dalam Pengembangan UMKM Di Kelurahan Lakwan, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang"

Dengan demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cakke,

PAREPARE

Surat Keterangan Wawancara

Nama : FITRIANI

Umur : 34

Alamat : Cakke

Menerangkan bahwa,

Nama : MIFTAHUL JANNAH

Nim : 2120203861206127


Prodi : Perbankan Syariah

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Implementasi Penyaluran KUR Dalam Pengembangan UMKM Di Kelurahan Lakwan, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang"

Dengan demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cakke,

PAREPARE


FITRIANI

Surat Keterangan Wawancara

Nama : HAWAIDA

Umur : 95

Alamat : Cakke

Menerangkan bahwa,

Nama : MIFTAHUL JANNAH


Nim : 2120203861206127

Prodi : Perbankan Syariah

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Implementasi Penyaluran KUR Dalam Pengembangan UMKM Di Kelurahan Lakwan, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang"

Dengan demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cakke,


Hawaida

Surat Keterangan Wawancara

Nama : EVIA SURIAJI

Umur : 55

Alamat : Cakke

Menerangkan bahwa,

Nama : MIFTAHUL JANNAH


Nim : 2120203861206127

Prodi : Perbankan Syariah

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Implementasi Penyaluran KUR Dalam Pengembangan UMKM Di Kelurahan Lakwan, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang"

Dengan demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cakke,


Evia S.

Surat Keterangan Wawancara

Nama : *Isma h Sarah*
Umur : *26*
Alamat : *Cakke*

Menerangkan bahwa,

Nama : MIFTAHUL JANNAH

Nim : 2120203861206127

Prodi : Perbankan Syariah

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Implementasi Penyaluran KUR Dalam Pengembangan UMKM Di Kelurahan Lakwan, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang"

Dengan demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cakke, 12-08-2021

Isma h Sarah
Isma h Sarah

Surat Keterangan Wawancara

Nama : ADE CAKRAWARDAYA S

Umur : 24

Alamat : BRI UNIT Cakke

Menerangkan bahwa,

Nama : MIFTAHUL JANNAH

Nim : 2120203861206127

Prodi : Perbankan Syariah

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Implementasi Penyaluran KUR Dalam Pengembangan UMKM Di Kelurahan Lakwan, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang"

Dengan demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cakke, 12 Juni 2023



ADE CAKRAWARDAYA S



PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)Tbk

KANTOR CABANG ENREKANG

UNIT CAKKE

Jalan Jend. Ahmad Yani No.267 CAKKE

Telepon : 0420-2311060, Facs. 0420-2311060

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Unit BRI Cakke, Menerangkan bahwa :

Nama : Miftahul Jannah
 NIM : 2120203861206127
 Universitas : Institut Agama Islam Negeri Parepare
 Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam
 Prodi : Perbankan Syariah
 Judul Skripsi : *Implementasi Penyaluran KUR dalam Pengembangan UMKM di Kelurahan Lakawan Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang*

Yang Bersangkutan telah melakukan penelitian di BRI Unit Cakke Kantor Cabang pada tanggal 20 Juni – 20 Juli 2025

Surat keterangan ini dibenarkan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

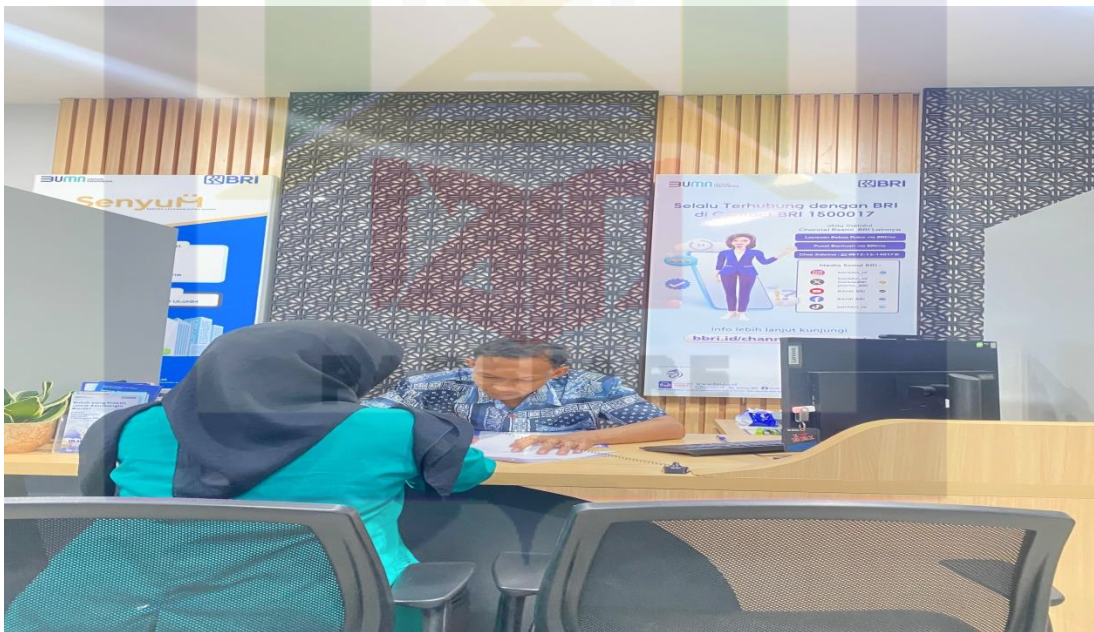
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk
 CABANG ENREKANG
 UNIT CAKKE



Muh Ardani Ibrahim
 Ka. unit



Wawaancaaraa dengan staf keluraahaan Lakawan



Wawancara dengan Staaf BRI Unit Cakke



Wawaancaaraa dengan penerima KUR



Wawaancaaraa dengan penerima KUR



Wawaancaaraa dengan penerima KUR



Wawaancaaraa dengan penerima KUR



Wawaancaaraa dengan penerima KUR



Wawaancaaraa dengan penerima KUR



Wawaancaaraa dengan penerima KUR



Wawaancaaraa dengan penerima KUR



Wawaancaaraa dengan penerima KUR



BIODATA PENULIS



Miftahul Jannah, lahir di Sossok, pada tanggal 13 Februari 2003. Anak pertama dari dua bersaudara yang lahir dari pasangan Herman dan Rasni. Penulis berkebangsaan Indonesia dan Beragama Islam. Riwayat pendidikan penulis memulai pendidikan di SDN Sossok 33 tahun 2008 dan tamat pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Anggeraja pada tahun 2014 sampai 2017.

Kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Enrekang pada tahun 2017 sampai 2020. Kemudian melanjutkan pendidikan di IAIN Parepare pada tahun 2021 dengan mengambil Program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. penulis melaksanakan kuliah Pengabdian Masyarakat di Kelurahan Lamasariang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar, kemudian Penulis melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di BRI Unit Cakke, ditahun 2025 penulis menyelesaikan Skripsi dengan judul, Implementasi Penyaluran KUR Dalam Pengembangan UMKM di Kelurahan Lakawan, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang.